

**ANALISISFAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PROGRAM BLT
di DESA SENYIUR, KECAMATAN KERUAK, KABUPATEN
LOMBOK TIMUR**



oleh
Darwan
NIM. 15.3.14.3.028

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2018**

**ANALISISFAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PROGRAM BLT
di DESA SENYIUR, KECAMATAN KERUAK, KABUPATEN
LOMBOK TIMUR**

Skripsi

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi
persyaratan mencapai gelar Sarjana Sosial**



**oleh
Darwan
NIM. 15.3.14.3.028**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Darwan, NIM: 153.143.028 dengan judul, "Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program BLT Di Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

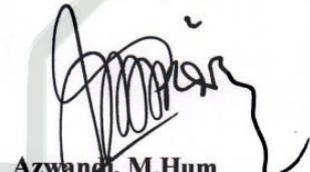
Disetujui pada tanggal: 18-4-2018

Pembimbing I,



Dr. Winengan, M.Si
NIP 197612312005011007

Pembimbing II,



Azwandi, M.Hum
NIP 197712312007101001

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 18 April 2018

Hal : *Munaqasyah* Skripsi

Kepada

Yth. Rektor UIN Mataram

di-

Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Darwan

NIM : 15.3.14.3.028

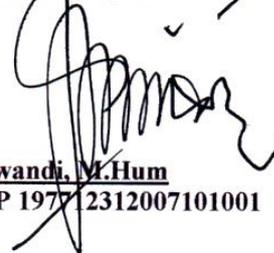
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul : Analisis Fktor Penghambat Implementasi Program
BLT di Desa Senyiur Kecamatan Keruak Kabupaten
Lombok Timur

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Oleh karena itu, berharap agar skripsi ini dapat segera *dimunaqasyahkan*.

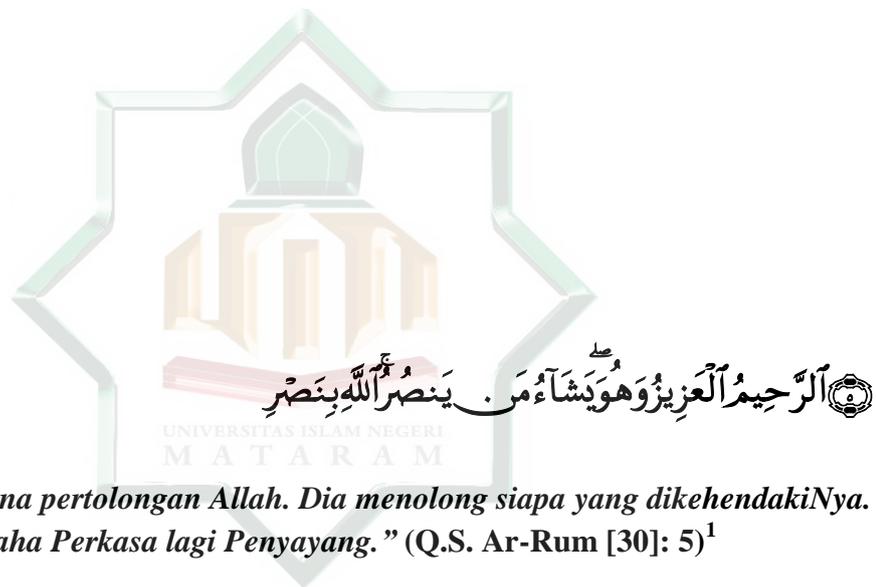
Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.**Pembimbing I,**

Dr. Winengan, M.Si
NIP 197612312005011007

Pembimbing II,

Azwandi, M.Hum
NIP 197712312007101001

MOTTO :



Artinya, “karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 5)¹

Perpustakaan UIN Mataram

¹Q.S. Ar-Rum [30]: 5

PERSEMBAHAN

Kedua orang tua tercinta (Muhsin dan Rauhun) yang selalu memberikan dukungan dalam doa, support, material dan kasih sayang terutama selama penyusunan skripsi, serta saudara saya satu-satunya Kaka Asmida yang selalu memberikan semangat dan dukungan tanpa henti dan selalu disertakan dalam do'anya dan keluarga besar saya selalu mendukung semua kegiatan perkuliahan saya.

Buat Alm. Ibu ku tercinta (Kasmawati) yang telah melahirkanku sehingga saya bisa menmpuh bangku perkuliahan ini dan beliau telah mengajariku tentang kesabaran dan ketabahan beserta orang yang saya cintai Lisa Juniarti Pandira yang telah memberikan saya pandangan, bantuan dan support supaya saya tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ketika saya malas.

Saudari saya Maulida Nursiana, S.T.P yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi dan selalu memberikan support.

Sahabat yang rasa saudara PMI B, Nurtini, Izmi Zulaika, Suryaningsih, Safratul Janiah, Mimi Huswatun Hasanah serta Sahabat B'RANGKAT, ESC UIN MATARAM dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan namanya yang selalu setia mendukung dan saling menasehati untuk kesuksesan kita semua.

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Darwan, NIM: 15.3.14.3.028 dengan judul: Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program BLT Di Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram pada tanggal 09 Juli 2018

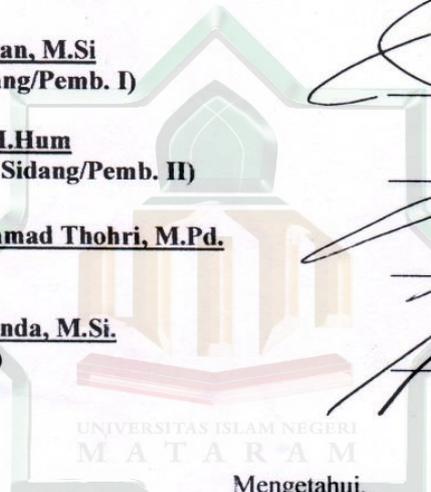
Dewan Penguji

Dr. Winengan, M.Si
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Azwandi, M.Hum
(Sekertaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Muhammad Thohri, M.Pd.
(Penguji I)

Khairy Juanda, M.Si.
(Penguji II)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi



Dr. H. Subhan Abdullah, MA
NIP. 197107102001121002

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan skripsi yang berjudul **Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program BLT Di Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur** dapat diselesaikan. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Winengan, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Azwandi, M.Hum selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
2. Azwandi, M.Hum, selaku Ketua Jurusan PMI dan H. Muhammad Syarifuddin M.Pd selaku Sekretaris Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
3. Dr. H. Subhan Abdullah, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram
4. Prof. Dr. H. Mutawalli, M.Ag, selaku Rektor UIN Mataram.
5. Kepala Desa Senyur dan seluruh jajaran yang telah berpartisipasi dan membantu memberikan kemudahan dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

Tidak lupa pula penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi. skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Sehingga diharapkan kritik dan saran yang menunjang dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Mataram, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENJELASAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PENGESAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kajian Teori.....	13
G. Metodologi Penelitian	25
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	33
A. Profil Desa Senyuir.....	33
1. Sejarah Desa Senyuir	33
2. Batas Wilayah Desa Senyuir	35
3. Kondisi Sosial Budaya	35
4. Kondisi Prasarana dan Sarana Desa	37
5. Kondisi Prekonomian.....	37
6. Orbitrasi.....	39
7. Agama dan Kepercayaan.....	39
8. Lembaga Pemerintah Desa Senyuir	40
B. Sasaran Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Senyuir	46
1. Masyarakat Miskin.....	46
2. Jumlah Bantuan yang Diterima	54

3. Jumlah Penerima BLT di Desa Senyur	55
4. Proses Penerimaan BLT	57
C. Faktor Penghambat Implementasi Program BLT di Desa Senyur.....	66
1. Pendataan Penerima BLT	66
2. Verifikasi Data	68
3. Tidak Konsisten dalam Penentuan Penerimaan BLT	69
4. Dampak Program BLT Bagi Masyarakat.....	72
BAB III PEMBAHASAN	74
A. Sasaran Implementasi Progeram BLT di Desa Senyur.....	74
B. Faktor Penghambat Penyaluran Progeram BLT di Desa Senyur.....	81
1. Pendataan Penerima BLT.....	81
2. Verifikasi Data	82
3. Tidak Konsisten Terhadap Penentuan Penerimaan BLT	83
4. Sikap Pelaksanaan BLT	84
BAB IV PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Batas Wilayah Desa Senyur.....	35
Tabel 2. Tata Guna dan Identifikasi Lahan	36
Tabel 3. Kondisi Potensi SDM.....	37
Tabel 4. Kondisi Prasarana dan Sarana Desa.....	37
Tabel 5. Jumlah Penduduk di Setiap Dusun.....	38
Tabel 6. Agama dan Aliran Kepercayaan	39
Tabel 7. Lembaga Pemerintahan.....	40
Tabel 8. Lembaga Kemasyarakatan	41
Tabel 9. Jumlah Penerima BLT di Setiap Dusun di Desa Senyur	55



Perpustakaan **UIN Mataram**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Senyur	49
Gambar 2. Sekema Verifikasi data BLT	57
Gambar 3. Profil Desa Senyur	92
Gambar 4. Kartu BLT	93
Gambar 5. Wawancara	93



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Penelitian dari BAPEDA	89
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian dari Desa	90
Lampiran 3. Kartu BLT	91
Lampiran 4. Profil Desa	92
Lampiran 5. Dokumentasi wawancara.....	93



Perpustakaan UIN Mataram

**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI
PROGRAM BLT di DESA SENYIUR, KECAMATAN
KERUAK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Oleh:
Darwan
NIM: 15.3.14.3.028

ABSTRAK

Penelitian tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidak aksesan secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2005 di Desa seniur untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah dalam program BLT serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat dalam keberhasilan program BLT tahun 2005 hingga sekarang di Desa Seniur. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pelaksanaan program BLT kurang maksimal hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain dalam Pelaksanaan lapangan seperti kurang efektif dalam sosialisasi program BLT, verifikasi data yang kurang lengkap dan akurat, tidak konsisten terhadap kriteria penentuan penerimaan BLT, dan pencairan dana yang tidak tentu. Adapun faktor-faktor yang mendukung serta menghambat keberhasilan dalam pelaksanaan program BLT adalah sikap serta pelaksana program yang maksimal, kondisi sosial ekonomi yang hampir sama yang mengakibatkan adanya kecemburuan, adanya situasi politik yang mendukung dan menolak program, ketegasan pelaksana program yang masih perlu ditingkatkan, dan koordinasi antara pelaksana program yang masih perlu dilegalkan.

Kata kunci: BLT, Implementasi, Faktor Penghambat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perDesaan. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. (BPS:2013).²

Didalam sila kelima dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Amanat tentang kesejahteraan masyarakat

²Nur Dhillah Haryanti, "Implementasi Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Kecamatan Tanjungpinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang Tahun 2012", diakses tanggal 01 juli 2017, 09.15.

merupakan tujuan utama dari proses pembangunan di Indonesia. Pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-undang negara Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang “sistem perencanaan pembangunan nasional satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana yang telah disusun secara sistematis dengan jangka waktu dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Disaat ini pembangunan di Indonesia mengalami kendala yang dikaren harga minyak mentah dunia melambung tinggi.

Dampak dari hal tersebut pada tanggal 01 Oktober 2005, pemerintah menetapkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka mengurangi beban subsidi. Tingkat kenaikan harga BBM pada saat ini tergolong tinggi dibanding dengan kenaikan harga sebelumnya, yaitu bensin: 87,5%, solar: 104,8%, dan minyak tanah: 185,7%. Keputusan ini diambil karena meningkatnya harga BBM yang sangat tinggi di pasar dunia sehingga berdampak pada makin besarnya penyediaan dana subsidi yang dengan sendirinya yang membebani anggaran belanja negara, pemberian subsidi selama ini cenderung lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas dan perbedaan harga yang besar antara dalam dan luar negeri memicu terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri. Kenaikan harga BBM menambah beban hidup masyarakat. Mereka tidak hanya menghadapi kenaikan harga BBM, tetapi juga kenaikan berantai berbagai harga barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Berbagai kenaikan yang terjadi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat,

terlebih rumah tangga miskin. Untuk mengurangi beban tersebut, pada tanggal 10 September 2005 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin menyediakan dana bantuan sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin. Besarnya dana adalah Rp. 100.000 per keluarga per bulan dan diberikan setiap tiga bulan. Pada penyaluran tahap pertama yang direalisasikan sejak 01 Oktober 2005 pemerintah menyediakan dana sebesar Rp.4,6 triliun. Penyaluran dana kepada rumah tangga miskin dilakukan oleh PT Pos Indonesia melalui kantor cabangnya di seluruh Indonesia.

Namun berbagai permasalahanpun ditemukan pada saat itu, selain pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai yang tidak tepat sasaran adalah akumulasi dari berbagai permasalahan ekonomi masa lalu, sementara pemerintah tidak mampu mengatasinya secara tepat sehingga membawa perekonomian kepada suatu keadaan stagflasi. Selama tiga dekade berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Namun ternyata kemiskinan belum dapat dituntaskan, bahkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Seiring dengan hal tersebut pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

sebesar 33 persen yang berlaku sejak Mei 2008 karena APBN sudah terlalu berat menanggung beban anggaran dan akhirnya pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran yang didasari oleh Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT). Walaupun pelaksanaan program ini belum terealisasi dengan baik, tetapi program BLT masih menjadi pilihan pemerintah untuk membantu dan meringankan beban masyarakat rumahtangga miskin atau rumah tangga sasaran.³

Bantuan Langsung Tunai (BLT), merupakan suatu bentuk bantuan dari pemerintah sebagai bentuk kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang tentunya mengibas kepada kehidupan masyarakat luas termasuk kalangan masyarakat miskin.⁴ Jadi itulah penyebab timbulnya sebuah program pemerintah guna untuk meminimalisir kemiskinan yang ada di Indonesia.

Awal mulainya Bantuan Langsung Tunai di Desa Senyuir dimulai sejak zaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu pada tahun 2005 berlanjut pada tahun, 2009 dan 2013, tentu dilihat karena angka kemiskinan banyak orang nganggur di Desa-Desa sangat membutuhkan

³Suharianto, "Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi tentang Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai)", eJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 4, 2013, hlm. 1593-1594.

⁴Dita Monita, "Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dengan Menggun Metode Analytical Hierarchy Process", Pelita Informatika Budi Darma, Volume III Nomor : 2, April 2013, hlm. 29.

bantuan secara tunai atau secara langsung yang bisa dimanfaatkan secara singkat tanpa melalui proses yang sangat lama dan itulah sejarahnya karena banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan berdasarkan data statistik data hasil survei.

Sistem penerapan BLT di Desa Senyur ada aturan-aturan main, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kepala keluarga salah satu persyaratan waktu itu dilihat dari kondisi rumahnya itu yang secara umum apakah rumah permanen atau rumah bedek, yang kedua sarana-prasarana yang ia miliki seperti sepeda motor atau mobil dan sebagainya yang di miliki, ketiga dilihat dari pendapatan setiap bulannya. Itulah sebagai dasar untuk menentukan, petugas dari Desa dan dari BPS bekerjasama untuk melihat secara langsung siapa yang berhak mendapatkan walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak ketimpangan-ketimpangan dan ketidak sesuaian antara kondisi yang mendapatkan BLT ini dengan yang sebenarnya.

Adapun dalam penerimaan BLT penerimaannya dari tahun ke tahun terjadi perubahan pada awal pemberlakuan BLT sejumlah Rp. 100.000 /bulan itu dibayar perenam bulan sehingga Rp. 600.000 /enam bulan, kemudian dalam perjalanannya ada peningkatan sebesar Rp. 400.000/dua bulan.

Penanganan BLT di Desa Senyur langsung dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa hanya memfasilitasi, menyampaikan kartunya,

menyampaikan undangan kapan pencairan, menyampaikan kapan penandatanganan langsung dari Pemerintah Pusat kartu disalurkan melalui Kantor Pos nanti masyarakat langsung mengambil ke Kantor Pos. Pemerintah Desa tidak campur tangan dalam proses pencairan tetapi Pemerintah Desa membantu masyarakat yang ada kekurangan dari administrasinya.

Bantuan Langsung Tunai yang ada di Desa Senyur masih menggunakan data lama yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga banyak yang tidak tepat sasaran, karena penerima ada yang meninggal dan banyak yang tidak sesuai dengan identitas yang di KTP atau Kartu Keluarga dengan administrasi yang sebenarnya sehingga kesulitan dalam pencairan. Salah satu faktor kenapa terjadi seperti itu karena banyak yang tidak memiliki Kartu Keluarga, karena bukan status sebagai Kepala keluarga sehingga tidak didata karena dianggap sebagai anggota, walaupun dia Jompo tetapi diam di anaknya jadi statusnya tidak dianggap sebagai Kepala keluarga, kadang-kadang dianggap mampu dilihat dari rumahnya dan sarana-prasarana yang ia miliki.

Penentuan RTS di Desa Senyur ditentukan langsung dari Pemerintah Pusat, data yang diperoleh di Desa Senyur masih menggunakan data lama yang dari Desa Induk sehingga kurang keterlibatan dari aparatur Desa Senyur sehingga sasaran kurang tepat banyak yang mestinya yang harus dapat itu yang tidak dapat, karena kurangnya keterlibatan aparatur Desa itulah salah satu yang menimbulkan

masalah kecemburuan sosial sehingga data terdahulu harus dirubah, karena dahulunya miskin sekarang kaya dan dahulunya kaya sekarang menjadi miskin.⁵

Dari program diatas peneliti tertarik untuk meneliti program BLT di Desa Senyuir Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, karena program ini sudah lama berjalan tetapi masih banyak masalah yang terjadi sehingga masyarakat masih banyak yang miskin, dalam penyalurannya sering terjadi tidak tepat sasaran dalam penerimaan BLT dan Masih menggunakan data yang terdahulu sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan data yang sekarang. Jumlah penerima BLT di Desa Senyuir ada 350 Kepala keluarga

Dalam hal inilah membuat peneliti tertarik dalam melakukan penelitian tentang Analisis Faktor Penghambat Implementasi BLT di Desa Senyuir Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, karena sampai saat ini dari program BLT yang belum membuahkan hasil yang memuaskan yang dilihat dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat Desa Senyuir yang mendapatkan program BLT yang berjalan sampai saat ini belum efektif, karena masyarakat di Desa Senyuir masih miskin dan masyarakat Desa Senyuir membutuhkan sistem penyaluran BLT yang adil.

⁵Muhaji, S.Pt, Kepala Desa Senyuir Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, wawancara pada tanggal, 16 Oktober 2017, 08:00 wita.

Dari penjelasan di atas Peneliti mengambil judul penelitian yakni:
“Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program BLT di Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sasaran implementasi program BLT di Desa Senyur?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat implementasi program BLT di Desa Senyur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sasaran implementasi program BLT di Desa Senyur!
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan program BLT di Desa Senyur!

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan hadirnya penelitian ini semoga bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai referensi dalam studi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis semoga pemerintah bisa mengambil pelajaran dari hasil penelitian ini sebagai pengetahuan supaya bisa menyalurkan program BLT dengan baik dan benar.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah upaya untuk mencari atau memadukan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dimana penelitian terdahulu senada dengan penelitian yang dilakukan, hal ini dilakukan tujuannya untuk menegaskan urgensi penelitian yang berjudul Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program BLT oleh pemerintah. Adapun penelitian terdahulu yaitu:

Akhmaludin, 2015, "*Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Keluarga Harapan (PKH)*". Skripsi ini menjelaskan peran pemerintah dan Dampak dari Program Keluarga Harapan (PKH). Peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui PKH di Desa Pejanggik yaitu memberikan Bantuan Langsung Tunai, mengadakan Posyandu satu kali satu bulan dan penyuluhan/pengarahan tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan, baik bagi ibu hamil maupun anak balita. Sedangkan di bidang Pendidikan yaitu memberikan bantuan tunai kepada calon siswa secara berkala. Dan dampak dari PKH terhadap masyarakat Desa Pejanggik yang terkategori penerima bantuan yaitu meningkatkan kesadaran bagi ibu-ibu hamil dalam memeriksa kesehatan secara rutin ke

Posyandu, menurunnya tingkat kematian ibu-ibu hamil dan anak balita, mengurangi angka putus sekolah atau *drop out*, dapat membantu meringankan biaya pendidikan bagi orang tua, tingkat akses pendidikan masyarakat semakin tinggi dan dengan adanya PKH ini masyarakat lebih mengerti dan sadar pentingnya menjaga kesehatan juga manfaat pendidikan bagi masa depan anak.⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Akmaludin pada tahun 2015 dengan penelitian yang peneliti lakukan mengenai Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program BLT di Desa Seniur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Persamaannya disini adalah sama-sama membahas tentang kebijakan pemerintah seperti program PKH secara umumnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perbedaannya penelitian Akmaludin membahas tentang PKH sedangkan penelitian ini lebih fokus dalam faktor penghambat dan penyaluran BLT di masyarakat karena dalam penyaluran ini masih banyak kesalahan seperti penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran dan banyak masalah yang lainnya.

Par'aini, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa*. Skripsi ini menjelaskan pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Kertasari Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok

⁶ Akhmaludin, "*Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Keluarga Harapan (PKH)*," (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Mataram, Mataram 2015). hlm. 80

Timur. Gerakan Program PKK berupaya untuk mewujudkan kemandirian para ibu-ibu untuk mengasah keterampilan dan pengetahuan tentang berusaha sehingga mampu untuk membantu menutupi prekonomian keluarga. Memberikan modal untuk rumah tangga miskin, pemberian modal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dari hasil musyawarah Desa dengan segenap jajaran Desa dan tentunya melibatkan masyarakat miskin lainnya, adapun modal yang kita berikan tidak hanya sekedar memberikan secara percuma-cuma melainkan mereka harus memiliki semangat untuk berusaha agar mereka memiliki penghasilan minimal untuk bertahan hidup setiap harinya. Membantu membiayai anak putus sekolah, pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dilakukan melalui aspek materil dan non materil yaitu melibatkan mereka dalam setiap program mulai dari pengambilan keputusan, penyusunan program, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan program dan menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut. Faktor yang mendukung dan pemanfaatan ADD di Desa Kertasari Kec. Labuhan Haji Kab. Lotim faktor pendukung dan faktor hambatan.⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan Par'aini dengan penelitian yang peneliti lakukan disini diantara kedua peneliti ini sama-sama membahas kebijakan pemerintah tentang kesejahteraan yaitu pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai dimana kedua program ini sama-sama membahas tentang kesejahteraan.

⁷ Par'aini, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Mataram, Mataram 2013). hlm. 72-74

Perbedaan diantara kedua penelitian ini ialah dimana penelitian terdahulu membahas pemamfaatan Alokasi Dana Desa yang penyalurannya tidak memberikan bantuan secara percuma-cuma melainkan melatih *Skill* yang dimiliki oleh masyarakat tersebut sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu program BLT yang dimana penyalurannya secara langsung.

Hulvan, 2013, *Efektifitas Program Pemerintah Melalui PNPM Mandiri dalam Usaha Penanggulangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Skripsi ini menjelaskan bahwa keberadaan PNPM Mandiri sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong tidak mampu secara materi, PNPM Mandiri hadir sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas serta memberdayakan kehidupan masyarakat.⁸

Persamaan penelitian Hulvan dengan penelitian yang peneliti lakukan mengenai Analisis Faktor Penghambat Implmentasi Program BLT di Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Persamaannya disini adalah kedua-duanya merupakan kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Perbedaannya penelitian yang dilakukan Hulvan mengambil program PNPM Mandiri sedangkan penelitian ini lebih fokus dalam faktor

⁸ Hulvan, *Efektifitas Program Pemerintah Melalui PNPM Mandiri dalam Usaha Penanggulangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Mataram, Mataram, 2013). Hlm 70-71

penghambat dan penyaluran BLT di masyarakat karena dalam penyaluran ini masih banyak kesalahan seperti penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran dan banyak masalah yang lainnya.

F. Kajian Teori

1. Analisis Kebijakan Publik

a. Definisi Analisis

Menurut Dunn (1991), analisis kebijakan sosial merupakan suatu ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan.⁹

b. Definisi Kebijakan Publik

Istilah kebijakan yang disepadankan dengan kata bahasa Inggris *'policy'* berbeda dengan *'kebijaksanaan'* (*wisdom*). Kebijakan merupakan pilihan tindakan yang lahir dari berbagai alternatif yang ada, dianalisis secara mendalam, dan bermuara kepada keputusan alternatif terbaik. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan suatu perangkat pedoman atau cetak biru bagi suatu tindakan (*blue print for action*) dalam rangka penyelesaian suatu

⁹ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 84.

permasalahan yang muncul akibat perilaku orang banyak yang tidak terpolakan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa berorientasi kepada tindakan.¹⁰

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye yang dikutip Young dan Quinn memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “*whatever governments choose to do or not to do.*”

Sebagai pilihan tindakan terbaik, kebijakan menurut W.I. Jenkis merupakan “*a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actor concerning the selection of goals and the mean of achieving the within the power of these actor to achieve*”. Artinya, kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik yang berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.¹¹

¹⁰ Winengan, *Analisis Kebijakan Publik*, (IAIN Mataram: CV. Sanabil, 2015), hlm. 17.

¹¹ Ibid. hlm. 18.

Menurut kamus administrasi publik, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Menurut Friendrich, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, berbagai hasil analisis terhadap berbagai kemungkinan terjadinya ancaman dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tertentu.¹²

Dari beberapa pendapat diatas, kebijakan publik diartikan sebagai suatu tindakan pemerintah, dan orang seringkali mengartikan kebijakan publik itu dibuat oleh pemerintah. tetapi pemerintah hanyalah sebagai aktor yang paling utama. Jadi keputusan suatu organisasi swasta, sosial, *social society*. Walaupun bertujuan untuk memecahkan masalah tetapi itu tidak dianggap sebagai kebijakan publik, karena banyak yang mengartikan kebijakan publik itu hanya dilakukan oleh pemerintah.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin adalah “Konsep implementasi

¹² Ibid. hlm. 19-20.

berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, mengimplementasikan (*to implement*) berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu (*to provide the means for carrying out*); dan untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (*to give practical effect to*).¹³ Secara konsep Lester dan Stewart menyatakan implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakannya meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Sedangkan dalam Kamus umum Bahasa Indonesia Implementasi adalah pelaksanaan, pertemuan kedua ini bermaksud untuk mencari bentuk dari apa yang telah disepakati.

Menurut George Edward III, yang dikutip dari buku Winengan yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Implementasi Kebijakan Publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹³

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu serta ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

¹³ Ibid, hlm. 129.

d. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan publik, model dibentuk berdasarkan oprasionalisasi dari tindakan nyata dalam mengaktualisasikan keputusan-keputusan kebijakan publik yang sudah ditetapkan. Model implementasi kebijakan dikonsepsikan berdasarkan proses tindak lanjut dari ketetapan kebijakan dalam bentuk aksi nyata yang dapat dirasakan secara langsung oleh Masyarakat. Berdasarkan pendekatan kebijakan menurut Lester dan Steward, model implementasi kebijakan terbagi menjadi dua yaitu *top down* dengan *the command and control approach* dan pendekatan *bottom up* dengan *the market approach*. Yang dimaksud dengan pendekatan *top down* yaitu implementasi kebijakan dilakukan secara terpusat dan dimulai dari aktor tingkat pusat. Demikian juga dengan keputusannya, tentunya diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah dibuat oleh para pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh para administratur atau para birokrat di bawahnya. Dengan demikian, maka inti dari pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.¹⁴

¹⁴ Ibid, hlm.130-131

e. Undang-Undang tentang BLT

Presiden mengeluarkan Inpres no 12 tahun 2005, pada tanggal 10 september 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin. Demikian pula pada tahun 2008 Presiden kembali mengeluarkan Inpres No 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, di sini Rumah Tangga Sasaran menurut Instruksi Presiden adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Fenomenanya yaitu pemberian BLT ini memang di khususkan hanya untuk masyarakat miskin saja tetapi pada kenyataannya orang kaya atau orang yang masih di anggap mampu ternyata juga mendapatkan BLT ini sedangkan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkannya.¹⁵

f. Implementasi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang di berikan oleh pemerintah untuk rumah tangga sasaran atau rumah tangga miskin. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005. Hal ini didukung dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2005 tentang program kebijakan pemerintah untuk

¹⁵Dian Marini, "Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak", Jom FISIP Volume 2 No. 1- Februari 2015, hlm. 2.

kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dimana Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Inpres No. 22 Tahun 2005 ditugaskan untuk segera:

- 1.) Mengkoordinasikan kegiatan penyiapan data, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin.
- 2.) Memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain yang menangani masalah kesejahteraan sosial.

Dana Bantuan Langsung Tunai tersebut diharapkan sampai kepada keluarga miskin yang ada di Desa atau kelurahan dan yang berhak untuk menerima dana Bantuan Langsung Tunai yang telah ditentukan. Penetapan direktori rumah tangga miskin ini ditetapkan oleh BPS Pusat yang terletak di Jakarta. Pembagian Kartu Kompensasi BBM (KKB) ketangan masyarakat dilaksanakan setelah melalui beberpa proses untuk menyeleksi dan memilih kepada keluarga mana yang benar-benar berhak mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menerbitkan dan membagikan Kartu Kompensasi Bahan Bakar Minyak (KKB) ketangan masyarakat. Proses penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah penyerahan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dilakukan di Kantor Pos

setiap kecamatan. Adapun skema penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).¹⁶

g. Sosialisasi Program BLT

Sosialisasi Program BLT 2008 antar lembaga dilakukan di tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan. Pelaksanaan sosialisasi antar lembaga yang diselenggarakan di tingkat kabupaten umumnya dimotori oleh Dininfokom, Dinsos, dan kantor pos. Hal ini berbeda dari pelaksanaan sosialisasi BLT 2005 dengan BPS sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan sosialisasi kepada aparat pemda. Selain melalui rakor, Dininfokom juga melakukan sosialisasi melalui pamflet, siaran radio, dan komferensi pers.

Adapun sosialisasi untuk masyarakat di Desa Senyuir tidak dilakukan secara formal. Masyarakat RTS umumnya mendapatkan informasi tentang BLT 2008 hanya dari aparat Desa/kelurahan. RTS memperoleh informasi tentang rencana pelaksanaan pencairan dana dari aparat Desa, terutama ketua RT/RW, pada saat menerima KKB. Di sisi lain, masyarakat non-RTS.¹⁷

¹⁶Suharianto, "Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Tentang Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai)", *eJournal Administrasi Negara*, 2013, 1 (4): 1593-1607, hlm. 1597-1598.

¹⁷ Meuthia Rosfadhila, Dkk, "Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia", Meuthia Rosfadhila et al. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2013, hlm. 11.

h. Program BLT

1) Definisi BLT (Bantuan Langsung Tunai)

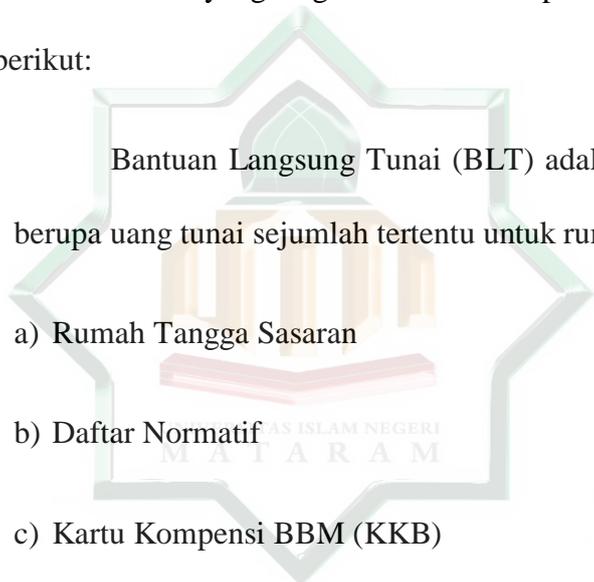
BLT adalah bantuan bersifat sementara yang diberikan kepada keluarga fakir miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Bantuan sosial yang diberikan dapat berbentuk bantuan santunan hidup, bantuan sarana usaha ekonomi produktif, atau bantuan sarana kelompok usaha bersama. Bantuan ini berupa bahan atau peralatan untuk menunjang usaha ekonomi produktif. Sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut, maka sarana usaha ekonomi produktif tersebut diberikan dan dikelola dalam sebuah kelompok usaha bersama yang berada dalam pembinaan pemerintah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, Program BLT-RTS pelaksanaannya langsung harus langsung menyentuh dan memberi manfaat langsung terhadap masyarakat miskin, mendorong tanggung jawab sosial bersama dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perhatian pemerintah yang secara konsisten benar-benar memperhatikan RTS yang pasti meras beban yang berat dari kenaikan harga BBM.

Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu dari bidang program PKPS-BBM yang diberikan kepada keluarga miskin dalam bentuk uang sejumlah Rp. 100.000 setiap bulan sekali yang dapat diambil melalui kantor POS yang ditunjuk untuk mencairkan dana tersebut.

Istilah-istilah yang digunakan dalam petunjuk teknis sebagai berikut:

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk rumah tangga sasaran.

- 
- a) Rumah Tangga Sasaran
 - b) Daftar Normatif
 - c) Kartu Kompensi BBM (KKB)
 - d) Giro Utama
 - e) Kanca BRI
 - f) Kantor Pos
 - g) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 - h) Kantor Pos Pemeriksa (KPRK)
 - i) Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM).
- Perpustakaan UIN Mataram

2) Tujuan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program BLT bertujuan untuk memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin, bertujuan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna membantu masyarakat agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, dan mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat.

3) Sasaran Program dan Besaran Bantuan Langsung Tunai

Penerima Bantuan Langsung Tunai adalah Rumah Tangga Sasaran hasil pendapatan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) di seluruh wilayah Indonesia. Sasaran Program BLT adalah kepada keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan hasil pendapatan BPS dan telah menerima KKB yang ditandatangani oleh Menteri Sosial.

Perpustakaan UIN Mataram

4) Operasionalisasi Dana Bantuan Langsung Tunai

Pelaksanaan program BLT bagi RTS adalah Departemen Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh pihak-pihak terkait yang telah ditetapkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program BLT untuk RTS. Penyaluran BLT-RTS merupakan suatu bentuk kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing lembaga bertanggung jawab terhadap kelancaran bidang tugas

masing-masing. Guna kerjasama ini untuk mempercepat proses penyaluran dana BLT-RTS kepada kelompok sasaran sehingga pemanfaatannya lebih optimal. Disini dibutuhkan koordinasi masing-masing lembaga.

5) Persyaratan Masyarakat Penerima Dana Bantuan Langsung Tunai

Disini ada 7 syarat warga miskin yang layak menerima BLT yang disebut sebagai variable kemiskinan.

- a) Luas lantai bangunan tempat tinggal dari 8meter dan lantai bangunan terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
- b) Tidak mempunyai jamban.
- c) Sumber air untuk kebutuhan sehari-hari berasal dari sumur, sungai, danau dan air hujan.
- d) Sumber penerang berasal dari bahan bakar, memasak menggunakan kayu, dalam seminggu hanya sekali mengkonsumsi daging, susu, dan dalam setahun hanya mampu membeli satu stel pakean, dan juga hanya satu atau dua kali sehari.
- e) Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan, buruh dan tani atau pekerja informal yang berpenghasilan Rp.600.000 perbulan.
- f) Pendidikan tertinggi SD.

g) Tidak memiliki harta senilai Rp. 500.000 seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor, kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.¹⁸

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif penelitian yang masih luas atau menyeluruh dan belum jelas. Karena data yang belum jelas. Karena data dan informasi yang peneliti kumpulkan lebih banyak bersifat keterangan-keterangan atau penjelasan yang bukan berbentuk angka.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan, rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial tertentu.¹⁹

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti lebih mudah berhadapan langsung dengan masyarakat di Desa Senyur dan berhubungan langsung antara peneliti dan yang diteliti. Dan dengan penelitian ini juga peneliti bisa terlibat secara langsung sehingga bisa lebih mudah untuk mendapatkan data dan melihat fenomena yang

¹⁸http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.landasan.teori.com/2015/10/pengertian-blt-bantuan-langsung-tunai.html?m%3D1&ei=_x4SzPYE&Ic=idID&s=1&m=746&host=www.google.co.id&ts=1491530542&sig=AJsQQ1BMn71toR66NHT15xvegj4KAQ. Jam 10:43 tanggal 07/04/2017.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: cv. Alfabeta, 2013). hlm. 210.

diteliti. Selain itu juga peneliti bermaksud untuk lebih memahami kondisi sosial secara mendalam.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam hal ini peneliti berperan sebagai partisipan dan pengumpul data tentang masalah yang difokuskan di dalam rumusan masalah yang peneliti telah buat. Peneliti langsung terjun ke masyarakat di Desa Senyur. Dan melihat bagaimana penyaluran BLT di Desa Senyur.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data valid yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif dan memudahkan mendapatkan data dari informan dalam penelitian, termasuk untuk mendapatkan kajian-kajian yang terjadi pada saat melakukan observasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Senyur, Kec. Keruak Kab. Lotim, karena di Desa tersebut sebagai salah satu Desa tempat penyaluran BLT.

4. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data-data tersebut diambil. Adapun sumber data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data skunder.

Data primer adalah data yang bersumber dari informan sumber utama penelitian. Sumber data penelitian ini bisa berbentuk informasi,

konsep dan keterangan yang diperoleh dari sumber data yang berbentuk uraian.

Jadi sumber data penelitian ini yaitu Kepala Desa dan masyarakat di Desa Senyur kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diambil dari kantor pemerintah yang sudah didokumentasi di kantor tempat penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁰

Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode seperti: teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Metode Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis. Teknik observasi bertujuan untuk

²⁰*Ibid.* hlm. 224.

memudahkan peneliti dalam mengunpulkan data-data yang dibutuhkan di masyarakat Desa Senyur, supaya peneliti yang dilakukan lebih efektif dan efesien yang tentunya dengan dukungan data-data yang valid dari hasil observasi.

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasikan menurut spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu *pleace* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).²¹

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah Observasi Nonpartisipan dimana observasi ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang faktor penghambat inflementasi BLT oleh pemerintah. Pengumpulan data dengan obsrvasi nonpartisipan ini tidak mendapat data yang mendalam dan sampai tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai dibalik prilaku yang tampak, yang terucapkan dan yang tertulis.²²

b. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin

²¹*Ibid.* hlm. 229.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (: CV. ALFABETA. 2009), hlm. 145-146

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.²³

Peneliti sendiri menggunakan teknik wawancara yang bersifat wawancara tidak beraturan tapi terkonsep, cara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan leluasa dalam memperoleh data tentang penyaluran program BLT dimana responden diminta penjelasannya, bagaimana penyaluran BLT di Desa Senyur, apakah penyaluran BLT tepat sasaran atau tidak. Dalam proses wawancara untuk mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara Kepala Desa Senyur.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yang peneliti maksud disini yaitu peneliti mencari data-data yang berbentuk dokumen-dokumen tertulis, gambar-gambar, baik itu data tentang jumlah RTS di Desa Senyur, dan arsip yang berkaitan dengan implementasian program BLT di Desa Senyur.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selama mengadakan penelitian perlu diolah dan dianalisis dengan teliti, keuletan, dan secara cermat sehingga mendapatkan suatu kesimpulan tentang obyek-obyek penelitian yang baik, menurut Nasir “Analisis data adalah

²³Ibid, hlm. 137

mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah dibaca”.²⁴

Berdasarkan definisi tersebut analisis data dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mengolah dan memaparkan data secara terorganisir dan sistematis. Pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan aturan-aturan yang ada sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Dalam data ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mengacu pada pengungkapan data sesuai dengan realita dan tidak menggunakan data angka atau statistik.²⁵

Analisis Data yang peneliti maksud disini bahwa data yang diperoleh dari berbagai sumber di lapangan, seperti data yang peneliti dapatkan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan data lain yang bersangkutan dengan penelitian. Kemudian peneliti menyusun data secara sistematis, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menyusunnya kedalam pola, mana saja yang lebih penting.

Untuk lebih tepatnya peneliti memilih hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan dan dimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan orang-orang yang bersangkutan yaitu penerima BLT dan masyarakat di Desa Senyur. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa Senyur.

²⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 358.

²⁵ Ibid. hlm. 369.

Dari temuan-temuan di lapangan, setelah melakukan pemilihan terhadap data-data yang dianggap penting, maka peneliti melakukan verifikasi untuk memberikan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah yang pernah diajukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperjelas sasaran tujuan penelitian, sehingga peneliti merumuskan jawaban dari hasil pertanyaan yang telah di rumuskan adapun tahapannya adalah merumuskan data yang di peroleh, memilih data penting sesuai dengan kebutuhan dan menganalisa data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

7. Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member cek*.²⁶

Validitas data dilakukan agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dipercaya oleh semua pihak, oleh kerena itu peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan teknik

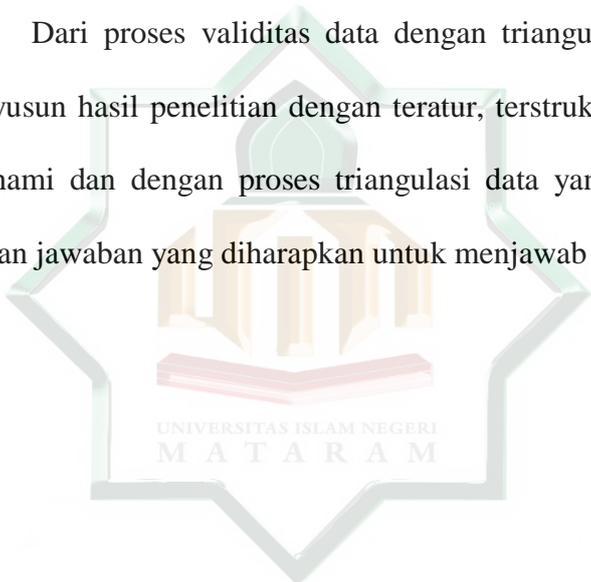
- a. Meningkatkan ketekunan, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan teliti dan berkesinambungan, dari proses meningkatkan ketekunan itu maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali data-data yang sudah dikumpulkan itu sesuai

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 270.

atau tidak, dari itu peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan tersusun rapi tentang apa yang diamati selama penelitian.²⁷

- b. Triangulasi, proses pengujian kredibilitas data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dari proses validitas data dengan triangulasi ini peneliti bisa menyusun hasil penelitian dengan teratur, terstruktur sehingga mudah dipahami dan dengan proses triangulasi data yang didapatkan sesuai dengan jawaban yang diharapkan untuk menjawab perumusan masalah.



Perpustakaan UIN Mataram

²⁷*Ibid*, hlm.272.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Profil Desa Senyuir

Desa	: Senyuir
Kecamatan	: Keruak
Kabupaten	: Lombok Timur
Pusat pemerintahan	: Di Senyuir
Status Desa/Kelurahan	: Desa

1. Sejarah Desa Senyuir

Senyuir sebelum menjadi sebuah Desa merupakan bagian dari wilayah Desa Sepit berbentuk salah satu Kekelangan yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah Desa Senyuir sekarang. Wilayah Kekelangan tersebut dibagi menjadi Dua kedadusan sekarang (kekadusan Senyuir dan Penendem).

Dua kedadusan tersebut berada pada saat perencanaan pemekaran Desa pada Tahun 2009. Untuk memenuhi salah satu persyaratan pemekaran tersebut, barulah wilayah Kekadusan Penendem dimekarkan menjadi wilayah Dusun Tambun, sehingga saat ini wilayah Desa Senyuir terdiri dari tiga wilayah Kekadusan.

Menurut legenda atau cerita asal mula terjadinya suatu wilayah yang mengandung nilai keajaiban, kata "**Senyuir**" diambil dari sebutir Kelapa yang dibawa oleh Putra Mahkota Kerajaan Selaparang yang bernama Dewa Maspaken yang brekspediksi bersama seluruh

prajuritnya /karena kalah beradu kesaktian melawan adik kandungnya sendiri yaitu “Dewi Anjani”. Sesampainya pada suatu tempat yang sampai sekarang dikenal dengan “*Kemalik Senyiur*”, Dewa Maspaken beristirahat setelah menempuh perjalanan jauh.

Sebutir Kelapa tersebut apabila dibagikan kepada prajuritnya tidak mungkin mencukupi, sehingga Dewa Maspaken memerintahkan para prajurit setianya tidur. Pada saat prajurit tidur itulah Dewa Maspaken menanam sebutir Kelapa itu. Dengan kesaktiannya sebutir Kelapa yang ditanamnya itu tumbuh subur dan berbuah banyak dalam sekejap. Sehingga begitu bangun para prajurit dapat menikmati buah Kelapa tersebut.

Mengacu dari sejarah Senyiur yang legendaris dan mengandung filosofi yang penuh makna yaitu “*Se*” dan “*Nyiur*”. *Se* berarti satu (*sa*) dan *Nyiur* berarti kelapa atau (*Buah Nyiur*), atas dasar itulah nama Senyiur disepakati menjadi nama salah satu Desa.

Sebagaimana Kelapa atau (*Nyiur*) yang dapat memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia maka Senyiur yang sekarang sudah menjadi sebuah Desa dan diharapkan memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat.

Senyiur yang telah resmi menjadi Desa memiliki wilayah yang dibagi menjadi 3 Kekadusan, yaitu: Dusun Senyiur, Dusun Penendem dan Dusun Tambun.

Pusat Pemerintahan Desa berada di wilayah Dusun Senyuir, yang mempunyai luas wilayah ± 527 ha yang terdiri dari areal persawahan seluas ± 477 ha, areal perkebunan seluas ± 25 ha, areal pemukiman seluas ± 15 ha dan lain-lain seluas ± 10 ha.

2. Batas Wilayah Desa Senyuir

Tabel. 2.1 Batas Batas Wilayah Desa Senyuir

BATAS	DESA/KEL	KECAMATAN
Sebelah timur	Desa mendana, Desa selebung, Desa keruak, Desa sepapan	Kecamatan sakra timur
Sebelah barat	Desa batu putik	Kecamatan jerowaru
Sebelah selatan	Desa sepapan	Kecamatan jerowaru
Sebelah utara	Desa sepit	Kecamatan sakra barat

Sumber: Kantor Desa Senyuir 2016

Desa Senyuir merupakan salah satu dari 15 Desa di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Sebelah utara Desa Senyuir berbatasan dengan Desa Sepit, sebelah selatan Desa Senyuir berbatasan dengan Desa Sepapan Kec. Jerowaru dan sebelah barat Desa Senyuir berbatasan dengan Desa Batu Putik dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Mendana, Desa Selebung Ketangga, Desa Keruak, dan Desa Sepapan. Desa Senyuir terdiri dari 3 Dusun yaitu (1) Senyuir, (2) Penendem, (3) Tambun.

3. Kondisi Sosial Budaya

a) Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam di Desa Senyuir meliputi sumber daya alam non hayati yaitu air, lahan, udara, dan bahan galian.

Sedangkan sumberdaya alam hayati yaitu perkebunan, flora dan fauna.

Tabel 2.2. Tataguna Dan Intesifikasi Lahan

NO.	Nama	Luas (Ha)
1.	Persawahan	477 Ha
2.	Perkebunan	25 Ha
3.	Permukiman	15 Ha
4.	Perkotaan/Fasilitas Umum	10 Ha
5.	Fasilitas SAB	5%
6.	Sumur Gali	85%
7.	PDAM	3%
8.	Perlindungan Mata Air	5%

Sumber daya air di Desa Senyur terdiri dari air tanah (akifer) termasuk mata air dan air permukiman. Berdasarkan atas besaran curah hujan perTahun, hujan lebih dan Evapotranspirasi Tahunan yang berpengaruh terhadap air meteorologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan.

b) Sumber Daya Manusia

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Desa Senyur terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Senyur, Dusun Penendem dan Dusun Tambun. Sedangkan sumberdaya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan tergolong sedang, sesuai dengan pendapatan Tahun 2017 yang lalu, bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai usia 50 Tahun ke atas tercatat sebanyak 324 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata disemua Dusun yang ada.

Tabel. 2.3. Kondisi Potensi SDM

Jumlah Penduduk	3.755 jiwa
Laki-laki	1.790 jiwa
Perempuan	1.965 jiwa
Penduduk Menurut Strata Pendidikan	
Sarjana (S1, S2, S3)	82 orang
Diploma (D1, D2, D3)	339 orang
SLTA/Sederajat	567 orang
SMP/Sederajat	990 orang
SD/Sederajat	1.529
Buta Aksara	
Usia 07-15 Tahun	90 orang
Usia > 15-45 Tahun	104 orang
Usia > 45 Tahun ke atas	200 orang

4. Kondisi Prasarana dan Sarana Desa

Tabel.2.4. Kondisi Prasarana dan Sarana Desa

Sarana dan Prasarana Pendidikan	
Gedung TK	2 unit (1 masih numpang)
Gedung SD/MI	4 unit
Gedung SMP/MTS	2 unit
Gedung SMA/MA	2 unit
Sarana dan Prasarana Transportasi	
Jalan Kabupaten	3.750 m
Jalan Lingkungan	7.550 m
Jalan Usaha Tani	4.700 m
Sarana dan Prasarana Ibadah	
Masjid	4 unit
Musholla	12 unit
Sarana dan Prasarana Kesehata	
Puskesmas	1 unit
Posyandu	6 Kelompok

5. Kondisi Prekonomian

Jumlah penduduk Desa Senyuir sebanyak 3.755 jiwa, dengan penduduk usia produktif 2176 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 360 jiwa. Mata pencaharian sebagian besar

penduduk Desa Senyur adalah Petani, sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Padi.

Tabel. 2.5 Jumlah Penduduk Disetiap Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
				Lk	Pr	Total
1.	Senyur	6	481	663	724	1387
2.	Tambun	6	418	566	528	1194
3.	Penendem	5	415	561	613	1174
Jumlah		17	1314	1790	1965	3755

Sumber: Data PEMERINTAH Desa Tahun 2016.

Jumlah keseluruhan Masyarakat Senyur yaitu laki-laki 1790 orang dan perempuan 1965 jadi total keseluruhan penduduk Desa Senyur adalah 3755 orang yang terdiri dari 1314 Kepala Keluarga.

Masyarakat Desa Senyur mayoritas bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini terlihat dari Banyaknya sawah di Desa Senyur. Sebagian masyarakat Desa Senyur bekerja sebagai petani terlihat dari sawah-sawah yang terletak dipedalaman Desa dimana Desa Senyur terdiri dari penduduk asli. Selain jadi petani masyarakat Desa Senyur ada juga yang bekerja sebagai peternak, buruh tani, sopir dan beragam profesi lainnya yang dimiliki oleh penduduk Desa Senyur. Selain sebagai petani dan peternak masyarakat Desa Senyur ada juga yang bekerja sebagai tukang walupun hanya beberapa orang, ada juga yang mencari nafkah dengan merantau ke luar negeri, kemudian ada juga sebagai tenaga pendidik atau guru baik guru SD/MI, MTs, ataupun MA/SMK bahkan ada pula yang menjadi Dosen, TNI dan lain-lain, hal ini didukung dengan lengkapnya sarana pendidikan yang ada di Desa Senyur.

Desa Senyur memiliki wilayah yang luas yaitu 471,00 Ha yang terdiri dari perkarangan penduduk, sawah, dan perkebunan. Desa Senyur memiliki tanah yang cukup subur karena sebagian besar tanah yang ada di Desa Senyur adalah tanah persawahan yang merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Senyur paling besar.

6. Orbitasi Desa Senyur

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 50 Km, Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan dengan kendaran bermotor 0,20 jam, Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan dengan berjalan kaki/kendaran non bermotor 1,00 jam, Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan 10,00 unit, jarak ke Ibu Kota Kabupaten/Kota 25,00 Km, Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dengan kendaran bermotor 0,30 jam, Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dengan berjalan kaki/kendaran non bermotor 2,00 jam, Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten/Kota 10,00 unit, Jarak ke Ibu Kota Provinsi 60,00 Km, Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi dengan kendaran bermotor 1,00 jam, Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi dengan berjalan kaki/kendaran non bermotor 5,00 jam, Kendaraan umum ke Ibu Kota Provinsi 15,00 unit.

7. Agama Dan Kepercayaan

Tabel.2.3 Agama Aliran Dan Kepercayaan

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1790 orang	1965 orang
Jumlah	1790 orang	1965 orang

Sumber: Dokumentasi Desa Senyur

Kepercayaan masyarakat Desa Senyur 100% penduduknya beragama Islam dapat dilihat dari gaya hidup serta keturunan dari masyarakat di Desa Senyur, penduduk yang ada di Desa Senyur dan dapat dilihat juga dengan banyaknya berdiri sarana peribadatan agama

seperti sekolah agama. Desa Senyuir memiliki banyak pemuka Agama dan memiliki kepercayaan agama yang sangat kental sehingga agama lain tidak ada kesempatan untuk berdomisili di Desa Senyuir, hal ini dikarena penduduk Desa Senyuir 100% beragama Islam.

8. Lembaga Pemerintah Desa Senyuir

Tabel.2.6.Lembaga Pemerintahan

Pemerintah Desa/Kelurahan	
Dasra hukum pembentukan pemerintah Desa/kelurahan	Perda
Dasar hukum pembentukan BPD	Perda
Jumlah aparat Pemerintahan Desa/kelurahan	10 orang
Jumlah perangkat Desa/kelurahan	10 unit kerja
Kepala Desa	Ada
Sekertaris Desa	Tidak ada
Kepala urusan pemerintah	Ada
Kepala urusan pembangunan	Ada
Kepala urusan pemberdayaan masyarakat	Ada
Kepala urusan kesejahteraan masyarakat	Ada
Kepala urusan umum	Ada
Kepala urusan keuangan	Ada
Jumlah staf	6 orang
Jumlah dusun di Desa	3 dusun
Kepala Dusun senyuir	Aktif
Kepala Dusun tambun	Aktif
Kepala Dusun penendem	Aktif
Tingkat Pendidikan Aparat Desa	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana
Kepala Desa	S1
Sekertaris Desa	SLTA
Kepala urusan pemerintah	Diploma
Kepala urusan pembangunan	SLTA
Kepala urusan pemberdayaan masyarakat	SLTA
Kepala urusan kesejahteraan masyarakat	Diploma
Kepala urusan umum	S1
Kepala urusan keuangan	SLTA

Badan Permusyawaratan Desa	
Keberadaan BPD	
Jumlah anggota BPD	
Pendidikan Anggota BPD	
Ketua	S1
Wakil ketua	S1
Sekretaris	S1
Nama Anggota BPD:	S1
Anggota: H. Mustamin	Diploma
Anggota: L. Abdul Muhid	SLTA
Anggota: Rusnan	SLTA

Telah dipaparkan dari tabel diatas yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Senyur memiliki banyak bidang dan pendidikan yang dimiliki oleh pejabat Pemerintah Desa Senyur rata-rata memiliki pendidikan yang tinggi.

Tabel.2.7. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Jumlah	1
Dasar hukum pembentukan	Berdasarkan keputusan kepala Desa
Jumlah pengurus	15 orang
Alamat kantor	Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur NTB
Ruang lingkup kegiatan	1 jenis, yakni Desa Senyur
PKK	
Jumlah	1
Dasar hukum pembentukan	Berdasarkan keputusan kepala Desa
Jumlah pengurus	27 orang
Alamat kantor	Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur NTB
Ruang lingkup kegiatan	6 jenis, yakni Desa Senyur
Karang Taruna	
Jumlah	1
Dasar hukum pembentukan	Berdasarkan keputusan kepala

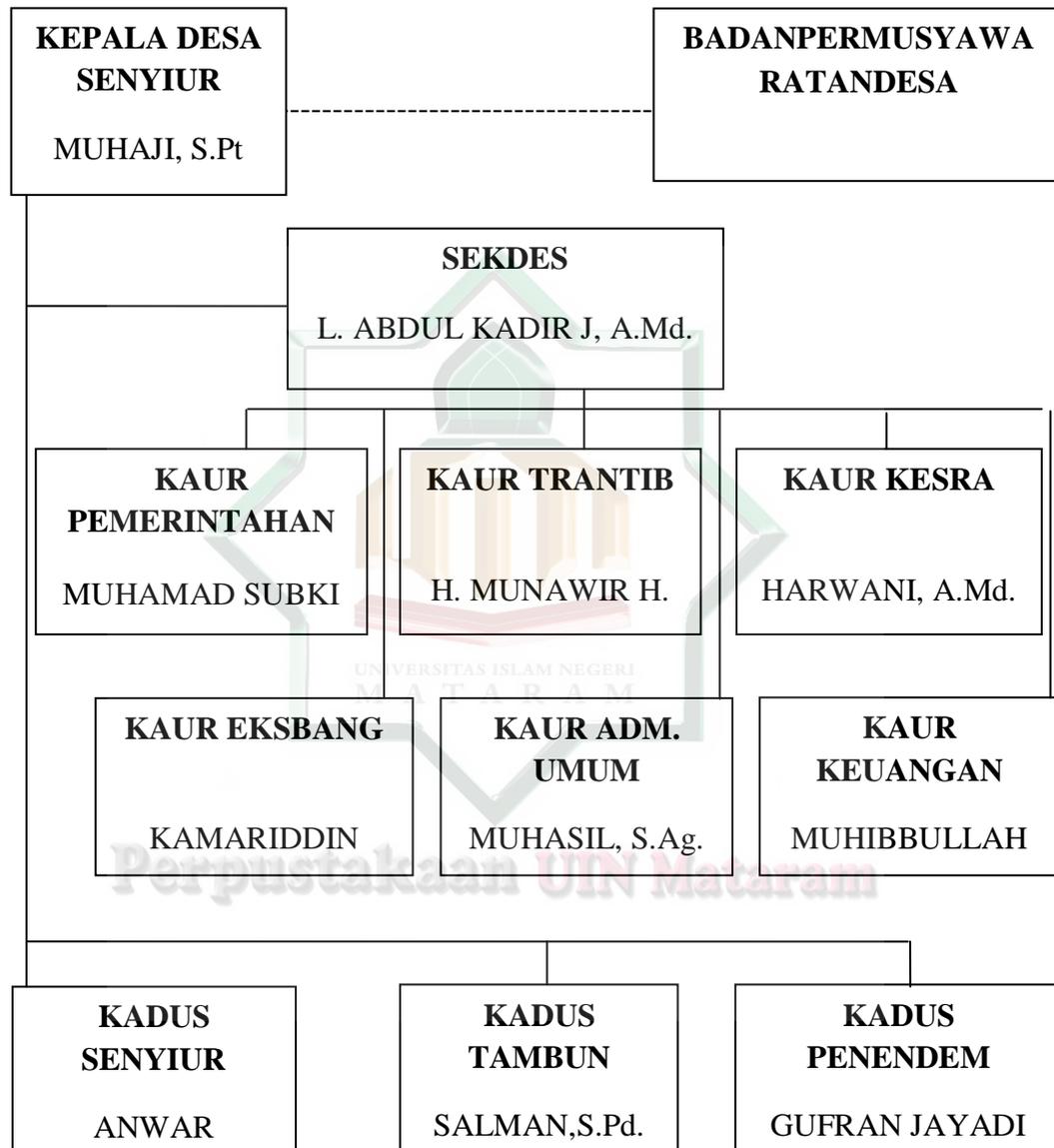
	Desa
Jumlah pengurus	37 orang
Alamat kantor	Desa Senyiur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur NTB
Ruang lingkup kegiatan	7 jenis, yakni Desa Senyiur
Kelompok Tani	
Jumlah	19
Dasar hukum pembentukan	Belum ada LKD atau belum ada dasar hukum
Jumlah pengurus	501 orang
Alamat kantor	Desa Senyiur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur NTB
Ruang lingkup kegiatan	2 jenis, yakni Desa Senyiur
Lembaga Adat	
Jumlah	1
Dasar hukum pembentukan	Belum ada LKD atau belum ada dasar hukum
Jumlah pengurus	250 orang
Alamat kantor	Desa Senyiur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur NTB
Ruang lingkup kegiatan	1 jenis, yakni Desa Senyiur
Badan Usaha Milik Desa	
Jumlah	1
Dasar hukum pembentukan	Berdasarkan perdes/perda kab/kota
Jumlah pengurus	3 orang
Alamat kantor	Desa Senyiur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur NTB
Ruang lingkup kegiatan	3 jenis, yakni Desa Senyiur
Organisasi Keagamaan	
Jumlah	4
Dasar hukum pembentukan	Belum ada LKD atau belum ada dasar hukum
Jumlah pengurus	12 orang
Alamat kantor	Desa Senyiur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur NTB
Ruang lingkup kegiatan	1 jenis, yakni Desa Senyiur
Organisasi Perempuan Lain	
Jumlah	10
Dasar hukum pembentukan	Belum ada LKD atau belum

	ada dasar hukum
Jumlah pengurus	141 orang
Alamat kantor	Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur NTB
Ruang lingkup kegiatan	2 jenis, yakni Desa Senyur
Organisasi Pemuda Lainnya	
Jumlah	1
Dasar hukum pembentukan	Belum ada LKD atau belum ada dasar hukum
Jumlah pengurus	25 orang
Alamat kantor	Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur NTB
Ruang lingkup kegiatan	10 jenis, yakni Desa Senyur
Panti	
Jumlah	2
Dasar hukum pembentukan	Belum ada LKD atau belum ada dasar hukum
Jumlah pengurus	8 orang
Alamat kantor	Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur NTB
Ruang lingkup kegiatan	1 jenis, yakni Desa Senyur
Lembaga	
Jumlah	3
Dasar hukum pembentukan	Belum ada LKD atau belum ada dasar hukum
Jumlah pengurus	9 orang
Alamat kantor	Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur NTB
Ruang lingkup kegiatan	1 jenis, yakni Desa Senyur
Yayasan	
Jumlah	3
Dasar hukum pembentukan	Belum ada LKD atau belum ada dasar hukum
Jumlah pengurus	45 orang
Alamat kantor	Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur NTB
Ruang lingkup kegiatan	10 jenis, yakni Desa Senyur

Sumber: Dokumentasi Desa Senyur

Desa Senyur memiliki Lembaga Kemasyarakatan yaitu: 1) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk atas keputusan Kepala Desa, memiliki pengurus yang berjumlah 15 orang dan memiliki kantor di Desa Senyur, 2) PKK dibentuk oleh keputusan Kepala Desa, memiliki pengurus yang berjumlah 27 orang dan memiliki kantor di Desa Senyur, 3) Karang Taruna dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Desa, memiliki pengurus yang berjumlah 37 orang dan memiliki kantor di Desa Senyur, 4) Kelompok Tani, memiliki pengurus yang berjumlah 501 orang dan memiliki kantor di Desa Senyur, 5) Lembaga Adat memiliki jumlah pengurus 250 orang dan memiliki kantor di Desa Senyur, 6) Badan Usaha Milik Desa dibentuk berdasarkan Perdes/Perda Kab/Kota, memiliki pengurus berjumlah 3 orang dan memiliki kantor di Desa Senyur, 7) Organisasi Keagamaan memiliki pengurus berjumlah 12 orang dan memiliki kantor di Desa Senyur, 8) Organisasi Perempuan memiliki jumlah pengurus 141 orang, dan memiliki kantor di Desa Senyur, 9) Organisasi Pemuda Lainnya memiliki pengurus berjumlah 25 orang dan memiliki kantor di Desa Senyur, 10) Panti memiliki jumlah pengurus 8 orang dan memiliki kantor di Desa Senyur, 11) Lembaga memiliki pengurus 9 orang dan memiliki kantor di Desa Senyur, 12) Yayasan memiliki pengurus berjumlah 45 orang dan memiliki kantor di Desa Senyur. Jadi terdapat ada 12 jumlah lembaga yang ada di Desa Senyur Kec. Keruak.

PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMUR
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH
DESA SENYIUR KEC. KERUAK
Alamat: Jalan Raya Jurusan Mendana-Tambun-Bt. Golok, 83672



Gambar: 1 Struktur Organisasi
Sumber: Dokumentasi, Tahun. 2017

B. Sasaran Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa

Senyur

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang di berikan oleh pemerintah untuk rumah tangga sasaran atau rumah tangga miskin. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005. Hal ini didukung dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2005 tentang program kebijakan pemerintah untuk kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dimana Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan.

1. Masyarakat Miskin

BAPENAS (2004), mendefinisikan masyarakat miskin sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok orang laki-laki maupun perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Dalam mengukur kemiskinan selain menggunakan kebutuhan dasar, BPS juga mempunyai kriteria khusus bahwa seseorang dapat disebut miskin dan berhak untuk mendapatkan berbagai program-program pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesmas). Adapun kriteria rumah tangga miskin antara lain:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m per orang
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal tanah, bambu/ kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
- d. Fasilitas buang air besar tidak punya/ bersama-sama dengan rumah tangga lainnya.
- e. Sumber penerangan rumah bukan listrik.
- f. Sumber air minum sumur mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- g. Bahan bakar masak sehari-hari kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
- h. Konsumsi daging, susu, ayam perminggu tidak pernah mengkonsumsi/ hanya satu kali dalam seminggu.
- i. Pembelian pakaian baru untuk setiap hari dalam dalam setahun tidak pernah membeli/ hanya membeli 1 stel dalam setahun.
- j. Makan sehari-hari untuk setiap hari hanya 1 kali makan/ dua kali makan.

- k.** Tidak mampu membayar untuk berobat ke puskesmas/ poliklinik.
- l.** Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000 per bulan.
- m.** Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD, dan hanya SD.
- n.** Tidak memiliki aset, tabungan, barang, yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000 seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Jadi itulah kriteria rumah tangga sasaran yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik untuk menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Inpres No. 22 Tahun 2005 ditugaskan untuk segera:

1. Mengkoordinasikan kegiatan penyiapan data, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin.
2. Memberikan akses data rumah tangga miskin kepada instansi pemerintah lain yang menangani masalah kesejahteraan sosial.

Dana Bantuan Langsung Tunai tersebut diharapkan sampai kepada keluarga miskin yang ada di Desa atau kelurahan dan yang berhak untuk

menerima dana Bantuan Langsung Tunai yang telah ditentukan. Penetapan direktori rumah tangga miskin ini ditetapkan oleh BPS Pusat yang terletak di Jakarta. Pembagian Kartu Kompensasi BBM (KKB) ketangan masyarakat dilaksanakan setelah melalui beberapa proses untuk menyeleksi dan memilih kepada keluarga mana yang benar-benar berhak mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menerbitkan dan membagikan Kartu Kompensasi Bahan Bakar Minyak (KKB) ketangan masyarakat. Proses penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah penyerahan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dilakukan di kantor pos setiap kecamatan. Adapun skema penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).²⁸

Perkembangan kenaikan harga minyak menyebabkan besaran subsidi mulai mengusik prinsip keadilan. Kenaikan harga BBM disadari berdampak secara berantai pada kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari sehingga berpengaruh pada penurunan daya beli, sebagian besar masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Kenaikan harga minyak mentah Dunia yang semakin tajam pada tahun 2008 memaksa pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada bulan Juni Tahun 2008. Bersamaan dengan itu pula pemerintah kembali

²⁸Suharianto, "Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Tentang Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai)", eJournal Administrasi Negara, 2013, 1 (4): 1593-1607, hlm. 97-98.

melaksanakan program BLT melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2008 (Inpres 3/2008) tanggal 14 Mei 2008 tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS). Program BLT ini memberikan Rp 100.000,- per bulan dimulai pada bulan Juni berakhir di bulan Desember Tahun 2008, selama tujuh bulan.

Tahun 2005–2006, Pemerintah pernah memberikan BLT kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) akibat kenaikan harga BBM pada bulan Oktober Tahun 2005. Program pemberian BLT Tahun 2005 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 (Inpres 12/2005) yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin. Program ini ditujukan untuk mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM pada kalangan yang paling miskin. Program ini bersifat temporer dan diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dan tidak mendorong menguatnya *the culture of poverty*.

Program BLT dirancang sebagai pengganti kenaikan biaya hidup yang terjadi jika harga BBM dinaikkan. Karena besaran BLT dihitung sebagai kenaikan biaya hidup penduduk miskin, dikaren kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM.

Program BLT tahun 2005 tersebut telah dilaksanakan selama satu tahun pada periode 2005–2006. BLT disalurkan kepada rumah

tanggamiskin sebesar Rp 100.000,- per bulan yang diterim per triwulan sebesar Rp 300.000,-.²⁹

Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran berdasarkan hasil survei dari BPS (Badan Pusat Statistik) dengan katagori Rumah Tangga Sangat Miskin dan Rumah Tangga Miskin di Desa Senyur. Berdasarkan hasil survei pendapatan BPS dan telah menerima KKB yang ditandatangani oleh Menteri Sosial.

Sasaran penerimaan BLT ini ditentukan oleh Pemerintah Pusat sehingga banyak diantara masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan bantuan itu yang tidak dan sebaliknya orang yang memang mampu itu yang mendapatkan sasaran penerapan program BLT ini terjadi kesalahan dan pendataan sehingga terjadi ketidak tepatan dalam penerimaan BLT. tetapi sebenarnya jika kita ukur dengan masyarakat yang ada di kota lebih layak untuk mendapatkan tetapi karena ada yang lebih bawah prekonomiannya dari masyarakat yang mendapatkan BLT sehingga itu yang menyebabkan dikatakan tidak tepat sasaran.³⁰ Hal ini berdasarkan surve dan wawancara yang dilakukan pada beberapa narasumber dari ketua RT dan masyarakat setempat seperti:

²⁹Hasbi Iqbal, *Implementasi Kebij Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus*, (Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 17-19.

³⁰ Muhaji, S.Pt, Kepala Desa Senyur Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, wawancara pada tanggal, 16 Januari 2018, 09:00 wita.

Wawancara dengan ketua RT:

Sasaran penerimaan BLT ni baun tekene ndek tepat sasaran sengk BPS sak terjun jok masyarakat ndek ne wawancarai selapuk KK (ye yelalok-lalok) endek ne hitung pire jumlah atau telek ruen kedaan bale ne, iye taok-taok lek dengan sak taok ne beketuan, padahalkan ndek ne taok ye tetu atau endek. sengk sebagian masyarakat sak wah te wawancara dait sebagian sak ndek te wawancara, lamun te yak engat sebagian masyarakat sak nyemauk BLT ekonomin lebih tinggi dait sebagian masyarakat sak ndek nyemauk.³¹

Artinya: Sasaran penerimaan BLT ini bisa dikatakan tidak tepat sasaran, karena BPS yang terjun ke masyarakat tidak mewawancarai semua KK (hanya sambilan) tidak di hitung jumlah atau keadaan rumah penduduk, hanya tau berdasarkan informasi yang di berikan orang tanpa tau informasi yang diberikan itu benar atau salah. karena sebagian masyarakat yang pernah diwawancarai dan sebagian yang tidak, jika dilihat sebagian masyarakat yang mendapatkan BLT ekonominya lebih tinggi daripada sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan BLT.

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai yaitu:

Wawancara dengan Inaq Zukaiyah

Lueq an dengan sak mampu sik ite sak nyemauk BLT ni, padahal balen te lenge dait pegawean semamen te ndek arak laguk

³¹ Muhaji, S.Pt, Kepala Desa Senyuir Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, wawancara pada tanggal, 16 Oktober 2017, 08:00 wita.

*ndek te bae wah nyemauk, Lamun dengan sak arak montor ne jak nyemauk ne brembeh ke jage ntan milek.*³²

Artinya kebanyakan orang yang lebih mampu dari saya yang mendapatkan BLT ini, padahal rumah saya jelek dan pekerjaan suami saya tidak ada tapi saya tidak pernah mendapatkan, kalau orang yang punya motor itu yang mendapatkan BLT bagaimana mungkin caranya dipilih.

Wawancara dengan warga yang tidak mendapatkan BLT Inaq Mahani.

*Ndek kuah bae nyemauk sak aran BLT tie tatiq padahal meni ruen pengirupan te dait meni ruen taok takaq te pokok sak arak isik te mangan sejelo-jelo, laguk ndek arak bae ntan penyemauk te BLT, berembek ke jage ntan tepilek tatiq ndek ketaon dengan sak solah taok takaq ne jak mauk ne, bedoe montor dait arak sak jari Haji laguk tetep ne nyemauk. Lamun ite sak meni ruen te jak ndek te bae tepemauk BLT.*³³

Artinya saya tidak pernah mendapatkan BLT cucuku padahal seperti ini penghidupan saya dan begini rupa tempat tinggal saya dan yang penting saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi saya pernah untuk mendapatkan BLT, bagaimana mungkin caranya dipilih orang yang bagus tempat tinggalnya itu yang mendapatkan, mempunyai motor dan ada juga yang jadi Haji tapi tetap dia dapat BLT.

³²Inaq Zukaiyah, masyarakat yang tidak mendapatkan BLT di Dusun Penendem, Desa Senyiur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, pada tanggal 16 Januari 2018, jam 18:43.

³³ Inaq Mahani, masyarakat yang tidak mendapatkan BLT di Dusun Senyiur, Desa Senyiur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, pada tanggal 14Februari 2018, jam 09:43.

2. Jumlah Bantuan yang Diterima

Penerimaan BLT dari tahun ke tahun terjadi perubahan pada awal pemberlakuan BLT sejumlah Rp. 100.000/bulan itu dibayar pertiga bulan Rp. 300.000/tiga bulan perenam bulan sehingga Rp. 600.000/enam bulan, kemudian dalam perjalanannya ada peningkatan sebesar Rp. 400.000/dua bulan.³⁴

Banyak pendapat dari masyarakat mengenai jumlah dana BLT yang diterima beragam, Berdasarkan survey dan wawancara dengan masyarakat yang menerima BLT adalah sebagai berikut

Wawancara dengan H. Abdurrahman

Jumlah dana BLT ini saya rasa terlalu sedikit untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya dan pencairannya tidak dilakukan setiap bulan dan dilakukan 1 kali dalam 3 bulan.³⁵

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Rahun:

Saya mendapatkan bantuan uang BBM pertamakali mengambil uang BBM sejumlah Rp.300.000/3 bulan diambil oleh suami saya sendiri, tetapi dipotong oleh RT Rp. 50.000 untuk dibagikan ke masyarakat yang tidak mendapatkan uang BBM.³⁶

³⁴ Muhaji, S.Pt, Kepala Desa Senyur Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, wawancara pada tanggal, 16 Oktober 2017, 08:00 wita.

³⁵Wawancara dengan H. Abdurrahman yang telah mendapatkan BLT di Dusun Penendem, Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur pada hari Pada tanggal, 14Februari 2018, jam 18:17.

³⁶ Ibu Rahun yang telah mendapatkan BLT hanya tiga kali pengambilan sampai tahun 2006 di Dusun Penendem, Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, wawancara pada hari Pada tanggal, 15 Januari 2018, jam 14:39.

Wawancara dengan Ibu Endang Mariati.

*Lupaq ke pire jumlah sak nyemauk te aran jak wah ngonek taok te tebagian BLT Rp. 300.000 jage per telu bulan te nyemauk pokok jak sekiteran nu wah nyemak te laguk wah ngonek ndek sugul Rp. 600.000 mauk te.*³⁷

Artinya saya lupa berapa yang saya dapatkan karena sudah lama dibagikan BLT mungkin Rp. 300.000 mungkin per tiga bulan mendapatkan yang penting sekitaran itu jumlah yang saya dapatkan dan juga sudah lama tidak keluar Rp. 600.000 yang saya dapatkan.

3. Jumlah Penerima BLT di Desa Senyuir

Jumlah penerima BLT di kecamatan Senyuir di bagi berdasar jumlah dusun yang ada di Desa Senyuir diantaranya terdapat 3 Dusun seperti dapat dilihat di tabel.

Table 2.6. Jumlah penerima BLT di setiap Dusun Senyuir Kecamatan Keruak

No.	Nama Dusun	Jumlah
1.	Dusun Senyuir	155
2.	Dusun Tambun	87
3.	Dusun Penendem	108

Sumber:Desa Senyuir.

Hasil dari Pendataan Sosial ekonomi Penduduk (PSE) tahun 2005 tersebut digunakan pemerintah sebagai *database* Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mendapatkan dana BLT tahun 2005, dan dengan *database* yang sama digunakan untuk pembagian dana BLT tahun 2008. Desa senyuir merupakan salah satu termasuk Desa yang penerima

³⁷Wawancara dengan Ibu Endang Mariati yang telah mendapatkan BLT di Dusun Penendem, Desa Senyuir, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, pada hari Pada tanggal, 15 Januari 2018, jam 16:37.

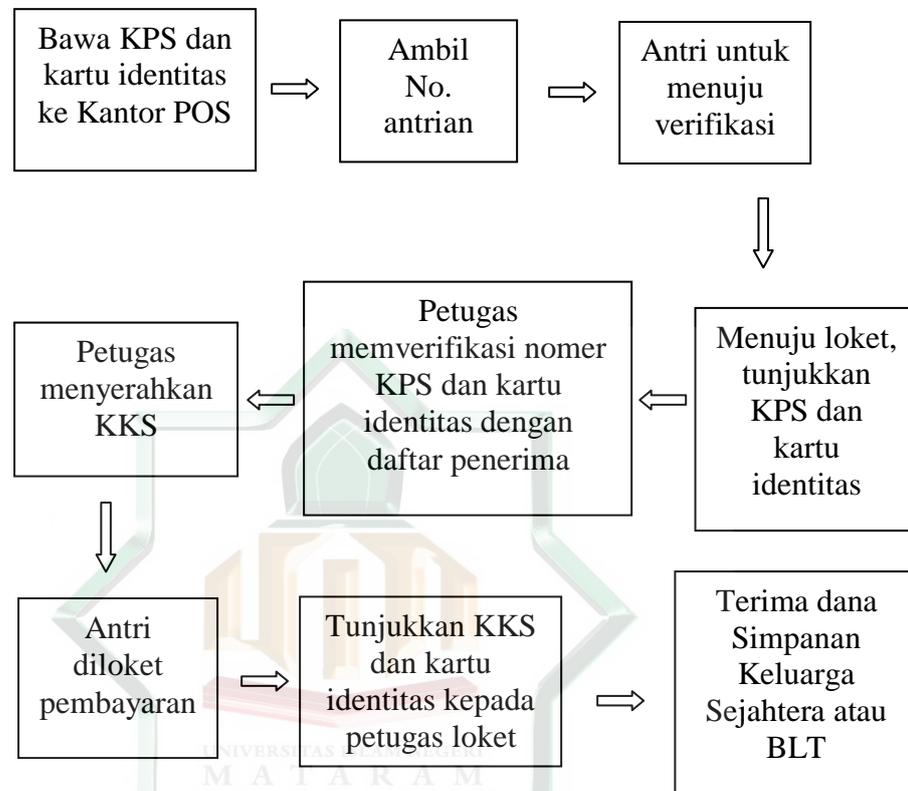
BLT dari pemerintah hal ini dikarenakan ekonomi dari masyarakat di Desa seniur yang hampir kebanyakan masyarakat yang kurang mampu dan berprofesi sebagai petani dan buruh.

Adapun data yang didapatkan dari Desa setempat berdasarkan dusun yang ada di Desa seniur. Jumlah dusun yang ada di Desa seniur sebanyak tiga dusun diantaranya dusun Seniur, di dusun seniur ada beberapa RT yang mendapat BLT seperti RT 01 Seniur jumlah KK yang mendapatkan BLT sebanyak 15 KK, RT 02 Dasan baru 42 KK, RT 03 Kecerit sebanyak 13, RT 04 Monjet 27 KK, RT 05 Jangkrung 58 sedangkan dusun Tambun RT 06 Tampeng 22 KK, RT 07 Tampeng 16, RT 08 Tambun selatan 19 KK, RT 09 Tambun utara 30 dan dusun Penendem yaitu RT 01 Yangget 12 KK, RT 02 Timuk kokoh 2 KK, RT 03 Marban 40 KK, RT 04 Dayen masjid 31 dan RT 05 Penendem 23 KK.

Dapat dilihat dari pemaparan data yang sudah ada, data penerima BLT Tahun 2015 Desa Seniur Kec. Keruak yang berasal dari semua dusun yang tersebar di Desa Seniur berdasarkan KK yang telah terdaftar di Desa Seniur, hal ini dikarenakan pendataan penerimaan BLT berdasarkan KK yang ada bukan berdasarkan perindividu hal ini dikarenakan memudahkan pemerintah untuk mendata penerimaan BLT sesuai kriteria yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.³⁸

³⁸ Daftar nama penerima BLT Desa Seniur, tahun 2015.

4. Proses Penerimaan BLT



**Gambar : 2. Skema verifikasi dan penerimaan BLT
Dokumentasi : Kantor POS**

Secara umum, tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran dana BLT menurut Departemen Sosial (2008 : 11 – 13) dalam skripsi Nur Dihllah Hariyanti seperti:

- a. Sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai, dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika Departemen Sosial, bersama dengan Kementerian/Lembaga di Pusat bersama pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Aparat Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, Kader Taruna

Siaga Bencana (TAGANA), pekerja sosial masyarakat (PSM), tokoh agama dan tokoh masyarakat).

- b. Penyiapan data Rumah Tangga Sasaran dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS Pusat). Daftar nama dan alamat yang telah tersedia disimpan dalam system database BPS, Departemen Sosial dan PT Pos Indonesia.
- c. Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran dari BPS Pusat ke PT Pos Indonesia.
- d. Pencetakan kartu Kompensasi BBM (KKB) berdasarkan data yang diterima oleh PT Pos Indonesia.
- e. Penandatanganan KKB oleh Menteri Keuangan RI. Pengiriman KKB ke kantor Pos seluruh Indonesia.
- f. Pengecekan kelayakan daftar RTS di tingkat desa/kelurahan.
- g. Penerima Program Keluarga Harapan juga menerima BLT, sehingga dimasukkan sebagai RTS yang masuk dalam daftar Pengiriman KKB ke kantor Pos seluruh Indonesia.
- h. Pengecekan kelayakan daftar RTS di tingkat desa/kelurahan.
- i. Penerima Program Keluarga Harapan juga menerima BLT, sehingga dimasukkan sebagai RTS yang masuk dalam daftar.
- j. Jika kondisi penerima KKB tidak memiliki identitas sebagai persyaratan kelengkapan verifikasi proses bayar, maka proses bayar dilakukan dengan verifikasi bukti diri yang sah (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan dari Kelurahan, dan lain-lain).

- k. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT oleh tim terpadu.

Adapun penjelasan dari tahapan dari penyaluran dana BLT yaitu:

a. Sosialisasi Program BLT

Sosialisasi Program BLT 2008 antar lembaga dilakukan di tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan. Pelaksanaan sosialisasi antar lembaga yang diselenggarakan di tingkat kabupaten umumnya dimotori oleh Dininfokom, Dinsos, dan Kantor Pos. Hal ini berbeda dari pelaksanaan sosialisasi BLT 2005 dengan BPS sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan sosialisasi kepada aparat pemda. Selain melalui rakor, Dininfokom juga melakukan sosialisasi melalui pamflet, siaran radio, dan konferensi pers.

Adapun sosialisasi untuk masyarakat di Desa Senyur tidak dilakukan secara formal. Masyarakat RTS umumnya mendapatkan informasi tentang BLT 2008 hanya dari aparat Desa/kelurahan. RTS memperoleh informasi tentang rencana pelaksanaan pencairan dana dari aparat Desa, terutama ketua RT/RW, pada saat menerima KKB. Di sisi lain, masyarakat non-RTS.³⁹

³⁹ Meuthia Rosfadhila, Dkk, "Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia", Meuthia Rosfadhila et al. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2013, hlm. 11.

b. PendataanPenerima BLT

Pendataan penerimaan BLT sudah berdasarkan BPS dan telah menerima KKB yang sudah ditanda tangani oleh mentri, sehingga pendataan dari penerimaan BLT berdasarkan data dari BPS yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat yang berdasarkan atas data setiap yang desa ada. Pendataan penerimaan BLT berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah, adapun kriteria-kriterianya yang ditentukan oleh pemerintah antara lain:

Luas lantai bangunan tempat tinggal dari 8 meter dan lantai bangunan terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.

- 1) Tidak mempunyai jamban.
- 2) Sumber air untuk kebutuhan sehari-hari berasal dari sumur, sungai, danau dan air hujan.
- 3) Sumber penerang berasal dari bahan bakar, memasak menggunakan kayu, dalam seminggu hanya sekali mengkonsumsi daging, susu, dan dalam setahun hanya mampu membeli satu stel pakean, dan juga hanya satu atau dua kali sehari.
- 4) Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan, buruh dan tani atau pekerja informal yang berpenghasilan Rp.600.000 perbulan.
- 5) Pendidikan tertinggi SD.

- 6) Tidak memiliki harta senilai Rp. 500.000 seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor, kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.⁴⁰

Berdasarkan pendataan penerimaan BLT dengan kriteria yg telah ditentukan pemerintah terjun langsung ke rumah masyarakat untuk meninjau valid dan tidaknya data yang ada dengan cara memeriksa kelengkapan kartu keluarga serta kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

c. Verifikasi Data Penerima BLT

Ketika melakukan verifikasi data penerima BLT kantor POS hanya memfasilitasi data penerima yang diganti kemudian diserahkan ke BPS dan Dinas Sosial.⁴¹

Penerima dana BLT di Desa Senjiur hasil pendataan dari Desa, jumlah masyarakat miskin yang ada di Desa Senjiur sejumlah 351 KK dan adapun jumlah data penerima BLT dari tahun 2005-2015 yang didapatkan dari hasil penelitian di Desa Senjiur sebanyak 350 KK dari 3 Dusun yang ada di Desa Senjiur. Dari data penerima BLT tersebut tidak semua masyarakat miskin yang mendapatkan BLT dan data yang sudah tidak layak dan kurang valid. Supaya data

⁴⁰http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.landasan.teori.com/2015/10/pengertian-blt-bantuan-langsung-tunai.html?m%3D1&ei=_x4SzPYE&Ic=idID&s=1&m=746&host=www.google.co.id&ts=1491530542&sig=AJsQQ1BMn71toR66NHT15xvegj4KAQ. Jam 10:43 tanggal 07/04/2017.

⁴¹Aqwan Hamda, Bagian Penjualan, Kantor Pos Selong, Kabupaten Lombok Timur, wawancara pada tanggal 05 Maret 2018, 14:15 wita.

BLT valid maka harus melakukan verifikasi data. Proses verifikasi data dilakukan ketika Kantor Pos menyerahkan kartu BLT ke Kantor Camat yang dihadiri oleh Kepala Desa. Pada kesempatan itu pihak Kantor Pos menyerahkan daftar nominasi RTS kepada Kepala Desa dan pihak Desa melakukan verifikasi data sebelum data penerima BLT dikembalikan ke Kantor Pos.⁴²

d. Pembagian Kartu BLT

Setelah melakukan verifikasi data, Kantor Pos menyerahkan kartu BLT berdasarkan nama yang telah diverifikasi dengan mengisi berita acara penyerahan kupon BLT. Selanjutnya Kepala Desa menyerahkan kepada Kadus dengan mengisi berita acara penyerahan kupon BLT. Berikutnya Kadus menyerahkan kepada Ketua RT dengan mengisi berita acara penyerahan kupon BLT. Terakhir Ketua RT menyerahkan kepada RTS dengan mengisi berita acara penyerahan kupon BLT.

Pihak Desa melakukan pembagian kartu BLT secara langsung oleh Kepala Dusun dan ketika nama yang bisa dikatakan tidak layak mendapatkan BLT, itu yang kita tahan dan mengalihkan ke masyarakat yang berhak untuk mendapatkan BLT.⁴³

⁴² Harwani, Kaur Kesra Desa Senyuir, Mantan Kepala Dusun Penendem, Desa Senyuir, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Wawancara, Tanggal 16 Januari 2018. Jam 10:15.

⁴³ Muhaji, S.Pt, Kepala Desa Senyuir Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, wawancara pada tanggal, 16 Januari 2018, 09:00 wita.

e. Pencairan Dana BLT

Mengenai pencairan dana BLT yang diberikan kepada masyarakat yaitu kami dari pihak POS telah memberikan data, kartu dan jadwal penerima BLT kepada pemerintah desa kemudian pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat dan dalam melakukan pengambilan dana, jadi masyarakat yang mendapatkan BLT tidak bisa diwakili.⁴⁴

Penanganan BLT di Desa Senyur langsung dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa hanya memfasilitasi, menyampaikan kartunya, menyampaikan undangan kapan pencairan, menyampaikan kapan penandatanganan langsung dari Pemerintah Pusat kartu disalurkan melalui Kantor Pos nanti masyarakat langsung mengambil ke Kantor Pos. Pemerintah Desa tidak campur tangan dalam proses pencairan tetapi pemerintah Desa membantu masyarakat yang ada kekurangan dari administrasinya.⁴⁵

Wawancara dengan H. Abdurrahman.

Kita diberikan informasi ketika waktunya untuk mengambil uang oleh Kadus, kemudian kita pergi mengambil uang BLT sendiri-sendiri dan tidak boleh diwakilkan.⁴⁶

⁴⁴ Aqwan Hamda, Bagian Penjualan, Kantor Pos Selong, Kabupaten Lombok Timur, wawancara pada tanggal 05 Maret 2018, 14:15 wita.

⁴⁵ Muhaji, S.Pt, Kepala Desa Senyur Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, wawancara pada tanggal, 16 Oktober 2017, 08:00 wita.

⁴⁶ Wawancara dengan H. Abdurrahman yang telah mendapatkan BLT di Dusun Penendem, Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur pada hari Pada tanggal, 14 Februari 2018, jam 18:17.

Adapun skema pencairan dana BLT yang telah dijelaskan diatas yang telah dikeluarkan oleh Kantor POS untuk dibagikan ke Pemerintah Desa dan kemudian dibagikan kepada masyarakat yang mendapatkan dana BLT.

Berdasarkan paparan diatas mengenai sasaran implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT), di Desa Senyur merupakan salah satu penerima BLT dikarenakan ekonomi masyarakat yang hampir kebanyakan masyarakatnya kurang mampu dan berprofesi sebagai petani dan buruh, dengan naiknya BBM yang dapat menyebabkan dampak yang berantai pada kenaikan harga barang, pokok sehari-hari yang menyebabkan penurunan daya beli khususnya rumah tangga yang pendapatan rendah. Berdasarkan Intruksi Presiden No 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 pelaksanaan program BLT untuk RTS, program ini memberikan BLT Rp 100.000,-per bulan dimulai pada bulan Juni dan berakhir pada bulan Desember tahun 2008 berlangsung selama 7 tahun. Pada tahun 2005 telah dilaksanakan selama periode 2005-2006 BLT disalurkan kepada RTS sebesarRp 100.000,- per bulan yang di terima per triwulan Rp 300.000,-. Adapun sasaran dari penerima BLT ini sudah ditentukan oleh pemerintah pusat yang berdasarkan data dan survei serta wawancara.

Tetapi berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada RT dan masyarakat di Desa Senyur sebagian besar mengatakan

penerima BLT tidak tepat sasaran karena tidak sesuai menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat ada yang tidak mendapatkan dengan ekonomi rendah sedangkan ekonomi yang cukup yang mendapatkan BLT yang mengakibatkan kurang berhasilnya program BLT disebabkan karena pendataan dan wawancara yang belum maksimal.

Dari jumlah bantuan yang diterima berdasarkan wawancara penulis pada beberapa masyarakat mengatakan jumlah yang didapatkan tidak menentu tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dana yang di berikan Rp 100.00,- per bulan dengan pencairan 3 bulan sekali, tetapi tidak sesuai dengan yang di dapatkan oleh masyarakat karena yang di dapatkan oleh masyarakat tidak menentu serta dikaren adanya pemotongan yang dilakukan di pihak RT hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh masyarakat bahwa BLT yang di terima tidak menentu disebabkan pencairan dana terkadang 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali dan harus dilakukan pemotongan oleh ketua RT di masing-masing dusun. Pengakuan ketua RT. Berdasarkan wawancara, dengan adanya pemotongan bertujuan untuk orang yang tidak mendapatkan BLT dengan ekonomi rendah bisa merasakan BLT.

C. Faktor Penghambat Implementasi Program BLT di Desa Senyiur

1. Pendataan Penerima BLT

Bantuan Langsung Tunai yang ada di Desa Senyiur masih menggunakan data lama yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga banyak yang tidak tepat sasaran, karena penerima ada yang meninggal dan banyak yang tidak sesuai dengan identitas yang di KTP atau Kartu Keluarga dengan administrasi yang sebenarnya sehingga kesulitan dalam pencairan. Salah satu faktor kenapa terjadi seperti itu karena banyak yang tidak memiliki Kartu Keluarga, karena bukan status sebagai Kepala keluarga sehingga tidak didata karena dianggap sebagai anggota, walaupun dia Jompo tetapi diam di anaknya jadi statusnya tidak dianggap sebagai Kepala keluarga, kadang-kadang dianggap mampu dilihat dari rumahnya dan sarana-prasarana yang ia miliki.⁴⁷

Kami dari pihak Kantor Pos tidak berhak untuk memverifikasi data melainkan hanya memfasilitasi untuk verifikasi data dan kemudian diserahkan ke BPS dan Dinas Sosial kemudian disana ditentukan penerima dari BLT, kemudian tentang keberlanjutan dari Program BLT pihak Pos belum mengetahui secara pasti karena belum ada informasi dari pemerintah pusat.⁴⁸

⁴⁷ Muhaji, S.Pt, Kepala Desa Senyiur Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, wawancara pada tanggal, 16 Oktober 2017, 08:00 wita.

⁴⁸ Aqwan Hamda, Bagian Penjualan, Kantor Pos Selong, Kabupaten Lombok Timur, wawancara pada tanggal 05 Maret 2018, 14:15 wita.

Banyak masyarakat konflik karena banyak masyarakat yang tidak layak untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai itu yang dapat, sedangkan masyarakat yang memang benar-benar pantas untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, tetapi tidak mendapatkan bantuan. Pemerintah Desa mengirim data baru yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan tetapi belum ditanggapi dari Pemerintah Pusat.⁴⁹

Wawancara dengan Masyarakat yang tidak mendapatkan BLT:

Laek pak Kadus lite barak te ntan sak arak BLT, Dengan jak arak wah datenglite nyurpe jok balen lamun ite jak ndek arak wah dateng, ndek te wah bae nyemauk BLT padahal pegawean semamen te ndek arak, mben sakit-sakitan laguk ndek nebae penyemauk te, dengan sak sogehan sik ite jak nyemauk ne laguk ite jak ndek te wah bae nyemauk, cume potongan lek dengan sak nyemauk nu iye tebagian te sik pak RT pade Rp. 50.000 nggak ne wah mauk te.wah te ketuan pak Kades laguk iye sugul aran lek puset unin barak te, jarin sampe nane ndek te wah bae nyemauk BLT.⁵⁰

Artinya: Dulu pak Kadus yang memberikan Informasi bahwa ada BLT, masyarakat yang lain ada yang pernah datang nyurvei ke rumahnya tetapi kalau saya tidak ada yang pernah datang ke rumah. Kita tidak pernah mendapat BLT sekali-kali sedangkan pekerjaan suami saya tidak ada, mana sakit-sakitan tapi tidak pernah mendapatkan saya, orang yang lebih kaya dari kita itu yang mendapatkan, kalau saya ndak pernah didapatkan BLT, saya Cuma

⁴⁹H. Munawir, Kaur Trantib dan Mantan Kepala Dusun Senjiur, Desa Senjiur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Wawancara pada tanggal 05 Desember 2017. Jam 09:50

⁵⁰Inaq Zukaiyah, masyarakat yang tidak mendapatkan BLT di Dusun Penendem, Desa Senjiur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, pada tanggal 16 Januari 2018, jam 18:43.

mendapatkan potongan dari masyarakat yang mendapatkan BLT sama-sama Rp. 50.000 cuman itu yang saya dapatkan. Sudah saya bertanya ke pak Kades tetapi pak Kades bilang itu nama yang keluar dari pusat. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah mnedapatkan BLT.

Penentuan RTS di Desa Senyur ditentukan langsung dari Pemerintah Pusat, data yang diperoleh di Desa Senyur masih menggunakan data lama yang dari Desa Induk, dan kurangnya keterlibatan dari aparatur Desa Senyur sehingga sasaran kurang tepat banyak yang mestinya yang harus dapat itu yang tidak dapat, karena kurangnya keterlibatan aparatur Desa itulah salah satu yang menimbulkan masalah kecemburuan sosial sehingga data terdahulu harus dirubah, karena dahulunya miskin sekarang kaya dan dahulunya kaya sekarang menjadi miskin.⁵¹

2. Verifikasi Data

Pemerintah Desa telah berupaya untuk melakukan verifikasi data penerimaan BLT yang memang sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan dana BLT, seperti hasil wawancara dengan staf desa:

Pemerintah Desa telah mengusulkan ke BPS dan berupaya untuk vrefikasi data penerima BLT yang tidak layak dan menggantikan untuk mendapatkan masyarakat yang layak untuk mendapatkan BLT dan jumlah masyarakat miskin lebih banyak dan Pemerintah Desa kewalahan dalam melakukan vrefikasi data, tetapi

⁵¹ Muhaji, S.Pt, Kepala Desa Senyur Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, wawancara pada tanggal, 16 Oktober 2017, 08:00 wita.

data penerima yang diganti tetap saja dan tidak berubah nama orang yang layak tersebut tetap keluar.⁵²

3. Tidak Konsisten dalam Penentuan Penerimaan BLT

Bantuan terakhir direalisasikan terakhir pada tahun 2015, sedangkan pembagian kartu telah diterima oleh masyarakat tetapi belum terealisasi sampai sekarang, sedangkan masyarakat bertanya tentang kapan pencairan dana BLT, tetapi pihak Desa tidak bisa menjawab pertanyaan masyarakat yang komflin dikarenakan Pemerintah Desa belum mendapatkan informasi dari Pemerintah Pusat.⁵³

Wawancaradengan Ibu Endang Mariati:

*“Terakhir te nerimak tahun 2014 lek presiden SBY, terus lek presiden jokowi tebagian te malik kartu laguk sampe nane ndek arak tebagiaan te kepeng, wah tetejanjik doang lek dese kene lemak bulan puase taok ne yak sugul tahun 2015, laguk sampe nane ndk arak bae dateng, laguk yak tenganteh doang yak simpen kartu ni ndk te ktaon lemak sang arak jage yak sugul”.*⁵⁴

Artinya: terakhir kita menerima pada tahun 2014 di Presiden SBY, terus di Presiden Jokowi kita dibagikan lagi kartu, tetapi sampai sekarang belum ada dibagikan uang, kita sudah dijanjikan di Desa bahwa dana keluar di bulan puasa tahun 2015, tetapi sampai

⁵²Harwani, Kaur Kesra Desa Senyur, Mantan Kepala Dusun Penendem, Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Wawancara, Tanggal 16 Januari 2018. Jam 10:15.

⁵³Harwani, Kaur Kesra Desa Senyur, Mantan Kepala Dusun Penendem, Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Wawancara, Tanggal 05 Desember 2017. Jam 09:26.

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Endang Mariati yang telah mendapatkan BLT di Dusun Penendem, Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, pada hari Pada tanggal, 15 Januari 2018, jam 16:37.

sekarang belum ada yang datang, tapi kita menunggu dan menyimpan kartu penerimaan BLT, siapa tau nanti keluar.

4. Sikap Pelaksana BLT

Terjadinya pemotongan dana BLT terjadi disemua Dusun di Desa Senyiur dan pelaku pemotongan dana BLT adalah Ketua RT dengan alasan melakukan pemotongan dana BLT tersebut adalah untuk pemerataan. Dari hasil potongan tersebut dibagikan ke masyarakat yang tidak mendapatkan BLT. Dalam penerimaan BLT, semua masyarakat yang mendapatkan BLT dipotong oleh Ketua RT sebesar Rp. 50.000 dan jika penerima BLT lebih banyak dilakukan pemotongan sama-sama Rp.100.000. Hal ini sesuai dengan hasil survei dan wawancara yang dilakukan dengan ketua RT dan masyarakat disetiap dusun yang ada di Desa Senyiur diantaranya adalah

Wawancara dengan Pak RT:

Kepeng BLT sik tepotong rate ntan te potong terus laun mbe sak mauk te potong nu muk te rekeng ne paden pire yak nyemauk dait paden pire ndek nyemauk BLT iye muk te bagik rate, kadang-kadang lamun arak lebeh ne jak muk te bagik ne PN laguk kadang-kadang. Jarin sebener tujuan te muk tepotong ne adek ne sak mauk rasak ne sik dengan sak ndek nyemauk BLT, laguk arak masyarakat sak ngraos lek muri sengkak sak tepotong kepeng ne, laguk tetep tepotong rate dait arak sak ikhlasi tepotong yak tebagik.⁵⁵

Artinya: Dana BLT dipotong rata caranya terus mana orang yang mendapatkan BLT itu yang kita potong dan kita

⁵⁵Amaq Nasrullah, RT 03 Dusun Penendem, Desa Senyiur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, wawancara pada tanggal 16 Januari 2018, jam 18:00.

menghitung sama-sama berapa mendapatkan dan berapa orang yang tidak mendapatkan BLT itu yang kita bagi rata, kadang-kadang kalau ada lebihnya itu yang kita bagikan ke PN itupun kadang-kadang. Jadi tujuannya pemotongan ini agar orang yang tidak mendapatkan BLT bisa merasakan, tetapi ada masyarakat yang berbicara dibelakang karena dana BLTnya dipotong dan ada yang ikhlas dipotong untuk berbagi.

Wawancara dengan masyarakat penerima BLT Ibu

Rahun:

Saya mendapatkan bantuan uang BBM pertamakali mengambil uang BBM sejumlah 300/3 bulan diambil oleh suami saya sendiri, tetapi dipotong oleh RT Rp. 50.000 untuk dibagikan ke masyarakat yang tidak mendapatkan uang BBM, karena banyak yang kecewa karena tidak mendapatkan bantuan, mungkin karena itu RT memotong uang yang kita dapatkan untuk dibagi ke masyarakat yang lain. Saya sendiri ikhlas untuk dipotong karena uang itu untuk dibagikan ke yang lain, saya berharap semoga benar-benar dibagikan.⁵⁶

Wawancara dengan H. Abdurrahman.

Setelah kita mendapatkan BLT, kita menerima secara utuh dari Kantor Pos, tapi setelah dirumah harus dipotong sama-sama Rp. 50.000 dan dipotong oleh Pak RT, tujuannya untuk pemerataan supaya yang lain juga mendapatkan BLT

⁵⁶Ibu Rahun yang telah mendapatkan BLT hanya tiga kali pengambilan sampai tahun 2006 di Dusun Penendem, Desa Senyuir, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, wawancara pada hari Pada tanggal, 15 Januari 2018, jam 14:39.

meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak yang penting dapat merasnyanya.⁵⁷

5. Dampak Program BLT Bagi Masyarakat

Adapun dampak dari program BLT memiliki dampak positif dan negatif seperti, dampak positif dari program BLT yang diadakan pemerintah sedikit membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat meringankan beban masyarakat.⁵⁸

Wawancara dengan Ibu Endang Marati:

“Luek manfaat ne, timak ne sekedik begak-begak arak sik te berombok beli isin pawon, isik belanje anak te sekolah, sanget sik te bersyukur nyemauk BLT. Laguk luek masyarakat sak lain macem unin raosan te sik dengan sik ne paran te sogeh, laguk ekinomi maseh te kurang”⁵⁹.

Artinya: Banyak manfaatnya, walaupun sedikit tapi ada tambahan buat beli bumbu dapur, buat belanja anak sekolah, sangat bersyukur mendapatkan BLT. tetapi banyak masyarakat yang lain berbicara dibelakang, mereka menganggap saya kaya, tetapi ekonomi masih kurang.

⁵⁷Wawancara dengan H. Abdurrahman yang telah mendapatkan BLT di Dusun Penendem, Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur pada hari Pada tanggal, 14Februari 2018, jam 18:17.

⁵⁸ Muhaji, S.Pt, Kepala Desa Senyur Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, wawancara pada tanggal, 16 Januari 2018, 09:00 wita.

⁵⁹Wawancara dengan Ibu Endang Mariati yang telah mendapatkan BLT di Dusun Penendem, Desa Senyur, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur pada hari Pada tanggal, 15 Januari 2018, jam 16:37.

Masyarakat merasakan dampak dari penyaluran Program BLT tersebut seperti hasil wawancara dengan H. Abdurrahman yang sekaligus menjadi tokoh agama di Desa Senyuir

Saya sebagai penerima bantuan BLT merasa bersyukur bisa mendapatkan BLT karena kita mendapatkan uang secara percuma tanpa mengeluarkan keringat untuk mendapatkan uang, meskipun jumlah uang dari BLT itu tidak terlalu banyak tetapi bisa mengurangi kebutuhan sehari meskipun habis dalam beberapa hari atau beberapa minggu.⁶⁰

Adapun juga dampak negatif dari program BLT tidak meratanya penyaluran dana BLT dan tidak lancarnya penyaluran dana BLT serta jumlah dana yang diterima tidak sesuai, hal ini dikarenakan harga barang yang semakin tinggi serta dana yang diterima sedikit dengan jarak penerimaan yang sangat lama yang membuat masyarakat banyak mengeluh. Dan program BLT ini kurang baik karena memberikan bantuan secara langsung diibaratkan masyarakat diberikan ikannya bukan diberikan pancingnya sehingga masyarakat menjadi manja dan mau yang instan saja.⁶¹

Berdasarkan paparan diatas mengenai faktor penghambat implementasi program BLT yang terjadi di Desa Senyuir tidak tepat sasaran hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria dan berdasar hasil

⁶⁰Wawancara dengan H. Abdurrahman yang telah mendapatkan BLT di Dusun Penendem, Desa Senyuir, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur pada hari Pada tanggal, 14Februari 2018, jam 18:17.

⁶¹ Muhaji, S.Pt, Kepala Desa Senyuir Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, wawancara Tanggal 05 Desember 2017. Jam 09:26.

penelitian yang dilakukan penulis penyebab dari faktor penghambatnya yaitu banyak penerima yang telah meninggal serta yang tidak sesuai dengan identitas KTP dan banyak masyarakat tidak memiliki kartu keluarga serta tidak adanya tindakan lanjutan oleh pemerintah pusat tentang pencairan dana BLT hal ini dapat dilihat dari pencairan danaBLT terakhir direalisasikan pada tahun 2015 tetapi kartu untuk penerimaan BLT sudah diterima, sehingga membuat masyarakat komplin terhadap pihak desa tetapi pihak desa tidak memiliki wewenang untuk menjawab hal ini dikarenakan tidak adanya konfirmasi dari pemerintah pusat dan dari pihak Pos tidak mengetahui kelanjutan dari pencairan dana BLT sampai sekarang.

. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada masyarakat terakhir dana yang keluar pada tahun 2014 pada masa pemerintahan SBY dan keluar lagi tahun 2015 tetapi dana yang ditunggu tidak ada, hanya ada pembagian kartu pengambilan dana BLT pada pemerintahan Jokowi. Dana yang ditunggu hingga sekarang dana BLT belum direalisasikan.

BAB III

PEMBAHASAN

Dari paparan data yang telah diuraikan yang telah didapatkan dalam proses observasi, wawancara dan dokumentasi seperti yang tercantum pada bab dua sehingga pada bagian ini peneliti membahas hasil dari temuan data yang telah diuraikan diatas di Desa Seniur kecamatan Keruak Lombok Timur, adapun pembahasan yang pertama yaitu:

A. Sasaran Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Seniur

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang di berikan oleh pemerintah untuk rumah tangga sasaran atau rumah tangga miskin. pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2005. Hal ini didukung dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2005 tentang program kebijakan Pemerintah untuk kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dimana Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang telah mempunyai ketentuan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada di masyarakat hal ini sependapat dengan teori Lester dan Steward , model implementasi kebijakan terbagi menjadi dua yaitu *top down* dengan *the command and control approach* dan pendekatan *bottom up* dengan *the market approach*. Yang dimaksud

dengan pendekatan *top down* yaitu implementasi kebijakan dilakukan secara terpusat dan dimulai dari aktor tingkat pusat. Demikian juga dengan keputusannya, tentunya diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah dibuat oleh para pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh para administrator atau para birokrat di bawahnya. Dengan demikian, maka inti dari pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.⁶²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Senyur kecamatan keruak bantuan dana BLT tidak maksimal tidak sesuai dengan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti, proses legilasi kebijakan selesai, maka kebijakan publik itu diimplementasikan pada masyarakat. Didalam proses Implementasinya adanya kemungkinan modifikasi isi ataupun penghapusan kebijakan dikarenakan sebab-sebab tertentu, hal ini sesuai dengan pendapat Friedrich, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, berbagai hasil analisis terhadap berbagai kemungkinan terjadinya ancaman dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada, dimana

⁶² Winengan, *Analisis Kebijakan Publik*, (IAIN Mataram: CV. Sanabil, 2015), hlm.131

kebijakan yang diusulkan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tertentu.⁶³

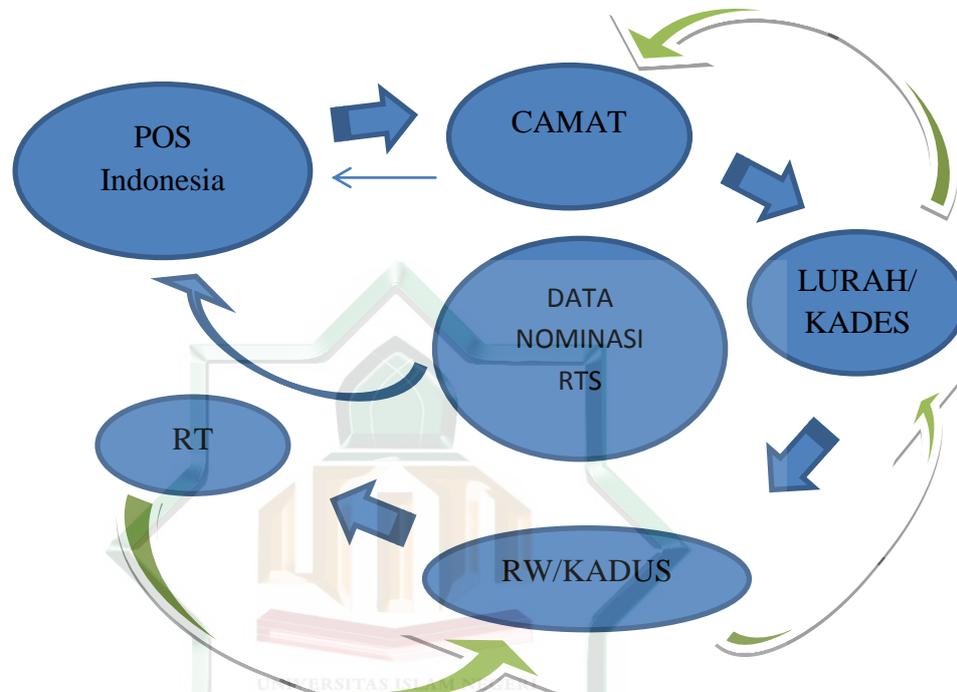
Pemerintah melakukan sosialisasi untuk program BLT di selengar di berbagai tingkat kabupaten kota. Adapun sosialisasi BLT yang dilakukan di Desa Senyur dengan cara tidak formal seperti, langsung terjun ke masyarakat diwakilkan oleh utusan dari pihak Desa seperti Kepala Dusun dengan RTS dan dilakukan musyawarah dan perkumpulan antar RT hal ini sesuai dengan pendapat Rosfadhila yang mengatakan Masyarakat RTS mendapatkan informasi tentang BLT 2008 hanya dari aparat Desa/kelurahan. RTS memperoleh informasi tentang rencana pelaksanaan pencairan dana dari aparat Desa, terutama ketua RT/RW, pada saat menerima KKB. Di sisi lain masyarakat non-RTS.⁶⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk ukuran pada implementasi program pemerintah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), pihak pelaksana di Desa Senyur berusaha dengan maksimal agar dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat tersalurkan secara langsung, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Oleh karna itu pemerintah melakukan Verifikasi data guna untuk memperoleh data penerima BLT yang tidak layak dan layak menerima untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan

⁶³ Winengan, *Analisis Kebij Publik*, (IAIN Mataram: CV. Sanabil, 2015), hlm. 17.

⁶⁴ Meuthia Rosfadhila, Dkk, "Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia", Meuthia Rosfadhila et al. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2013, hlm. 11.

keadaan yang ada pada masyarakat. Adapun skema dalam proses Verifikasi data nominasi RTS adalah sebagai berikut:



Gambar: 3. Skema Verifikasi data BLT
Sumber: Modifikasi Depertemn sosial RI (2008)

Gambar 3 diatas merupakanan sekema atau sistematika untuk melakukan verifikasi data dengan benar dan Desa Senjiur telah melakukan sistematika verifikasi data seperti pada gambar diatas, tetapi nama penerima yang telah di verifikasi tetap keluar dan tidak ada perubahan yang terjadi.

Setelah dilakukannya Verifikasi data selanjutnya dilakuknya pembagian kartu untuk penerimaan BLT, berdasarkan survei yang dilakukan kartu sebagai alat pengambilan BLT, dari sumber yang di dapatkan dari tahun ke tahun kartu BLT berubah sesuai dengan presiden yang menjabat.

Dengan adanya kartu BLT, penyaluran dana lebih praktis, tetapi berdasarkan penelitian di Desa Senyur terjadi beberapa masalah di masyarakat hal ini dikarenakan tidak meratanya pembagaaian kartu sehingga terjadi perotes dari masyarakat hal ini disebabkan pendataan yang dilakukan kurang maksimal dikarenakan banyak terjadi kesalahan dalam Verifikasi data, dimana dalam pendataan yang dilakukan kurang maksimal, berdas survei yang dilakukan di Desa senyur pendataan penerimaan BLT dilakukan sekelompok orang utusan dari Pemerintah Pusat tanpa melibatkan Pemerintah Desa yang menyebabkan pendataan yang kurang merata dan sistem pendataan dengan menggunakan sumber yang kurang valid berdasarkan data seperti halnya dalam pencapaian tujuan dari program BLT tersebut sudah bisa dikatakan sedikit berhasil karna sebagian yang sudah mendapatkan bantuan berhasil membantu masyarakat miskin, namun ada sebagian masyarakat miskin yang belum menerima BLT.

Hal ini dapat dilihat dari pembagian kartu Dalam pencapaian tujuan program BLT tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan tujuan program BLT. Pencapaian-pencapaian kebijakanBLT di Desa Senyur masih belum tercapai. Hal ini dapat dilihat dari ukuran atau target yang ingin dicapai masih belum memenuhi target, seperti halnya dalam penetapan masyarakat penerima BLT yang belum tepat sasaran dimana pada masyarakat miskin atau sangat

miskin yang masih ada banyak ditemukan tidak terdaftar sebagai penerima BLT.

Penerima Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran berdasarkan hasil survei dari BPS (Badan Pusat Statistik) dengan katagori Rumah Tangga Sangat Miskin dan Rumah Tangga Miskin di Desa Senyur. Berdasarkan hasil survei pendapatan BPS dan telah menerima KKB yang ditandatangani oleh Menteri Sosial.⁶⁵

Adanya program BLT di Desa senyur banyak menuai komflik hal ini disebabkan oleh tidak meratanya hasil survei yang dilakukan sehingga banyak kontrofersi yang terjadi dikalangan masyarakat, hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat mendapatkan BLT dengan Kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah seperti masyarakat sangat miskin dan masyarakat miskin yang berdasarkan datadalam BPS (Badan Pusat Statistik).

Berdasarkan pendataan dari BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan pendataan dilakukan untuk mendapatkan data Rumah Tangga Sangat Miskin dan Rumah Tangga Miskin yang berhak menerima bantuan dari pemerintah yaitu BLT untuk membantu memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat banyak sekali keluhan yang terjadi salah satunya pendaataan yang tidak merata seperti masyarakat mampu yang mendapatkan BLT hal ini dikarenakan

⁶⁵Muhaji, S.Pt, Kepala Desa Senyur Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, wawancara pada tanggal, 16 Oktober 2017, 08:00 wita.

permainan dalam pendataan yang terjadi hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya ketidak jujuran dalam melakukan survei, seperti tidak dilibatkannya pihak Desa yang bersangkutan, hanya petugas yang telah ditugaskan oleh BPS yang langsung terjun ke masyarakat tanpa melibatkan Desa yang bersangkutan.

Seperti contoh Desa Senyuir, Desa Senyuir merupakan Desa baru hasil pemekaran dari Desa Sepit sehingga dalam pendataan KK yang mendapatkan BLT tidak merata karena pendataan penerima BLT masih menggunakan data lama sebelum pemekaran Desa. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan BLT yang menyebabkan kecemburuan sosial pada masyarakat satu dengan yang lainnya.

Seperti penentuan penerimaan Bantuan Langsung Tunai tidak memiliki efektifitas dari segi penyaluran di lapangan. Seperti hasil wawancara yang dilakukan di Desa Senyuir kasus pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh BPS. contohnya masyarakat yang kurang mampu ada yang tidak mendapat BLT tetapi ada masyarakat mampu yang mendapat BLT. Hal ini pemerintah menganggap bahwa ini bersifat kasustik. Akan tetapi kesalahan terletak di lapangan, kesalahan penyaluran bantuan berasal dari data yang kurang jelas dari lapangan yang menyebabkan terjadinya kecemburuan antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Sampai saat ini pemerintah tidak pernah melakukan pendataan dan pencacahan ulang tentang data rumah tangga miskin penerima BLT serta kejelasan bantuan BLT yang dari tahun ke tahun mengalami kemuduran. Dari hasil wawancara warga Desa Senyur adapun penerimaan BLT dari tahun ketahun mengalami perubahan pada awal pemberlakuan program BLT jumlah BLT yang diterima Rp.100.000/bulan di bayar per 6 bulan sekali sehingga berjumlah Rp.600.000/6 bulan, tetapi terjadi peningkatan Rp.400.000/2 bulan. Program BLT dari tahun ketahun mengalami perubahan sehingga penyaluran BLT aktif sampai tahun 2015 dan saat ini sudah tidak ada penyaluran dana BLT lagi tetapi kartu penerimaan BLT sudah dibagikan ke masyarakat, namun dananya belum direalisasikan sampai sekarang oleh pemerintah.

B. Faktor Penghambat Penyaluran Progeram BLT di Desa Senyur,

Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur

1. Pendataan Penerima BLT

Data penerima BLT yang ada di Desa Senyur masih menggunakan data lama sebelum dilakukanya pemekaran Desa sehingga yang mengakibatkan ketidak sesuaian dengan kondisi saat ini sehingga tidak merata, hal ini disebabkan karena penerima ada yang meninggal dunia dan banyak yang tidak sesuai dengan identitas yang ada di KTP atau Kartu Keluarga yang ada sehingga administrasi yang sebenarnya yang menyebabkan kesulitan dalam pencairan.

Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki Kartu Keluarga, hal ini dikarenakan hanya sebagai anggota keluarga bukan sebagai Kepala keluarga, hal ini dikarenakan pendataan berdasarkan per KK bukan berdasarkan per orang sehingga banyak yang tidak didata karena dianggap sebagai anggota keluarga, seperti halnya masyarakat yang sudah tua tetapi tinggal bersama keluarga seperti anaknya sehingga menyebabkan statusnya tidak dianggap sebagai Kepala keluarga, yang menyebabkan pendataan menyatakan mampu dilihat dari perekonomiannya seperti penghasilan, rumah dan sarana-prasarana yang dimiliki.

2. Verifikasi Data

Data penerimaan BLT, seperti salah satu perubahan penerimaan dari Desa seperti masyarakat yang sudah meninggal dunia yang sudah didata sebagai penerima BLT di cabut oleh pihak Desa dan warga yang dulunya terdata sebagai penerima tetapi dari tahun ketahun mengalami kemajuan perekonomian yang dilihat dari hasil serta kepemilikannya yang dirasa mampu maka pihak Desa mencabut kartu penerimaan BLT dialokasikan kepada warga yang miskin hal ini menyebabkan kekeliruan pendataan dari pemerintah dan membuat pihak Desa kewalahan dalam hal ini dikarenakan jumlah penyaluran dana yang keluar lebih sedikit dibandingkan data masyarakat yang menerima BLT.

Penyampaian BLT membutuhkan data tentang siapa dan dimana RTS yang layak menerima BLT tersebut bertempat tinggal. Data tersebut merupakan data kemiskinan mikro yang memuat informasi tentang nama dan alamat serta karakteristik kemiskinan lainnya. Penerima BLT tahun 2008-2015 ditetapkan berdasarkan hasil pendataan tahun 2005. Pemakaian data tahun 2005 untuk pembagian BLT ini tentu sangat miris, dikarenakan data tersebut sudah tidak valid, dan terjadi banyak perubahan. Ada yang dulunya miskin, kemudian sudah terangkat derajatnya dan ada pula yang dulunya pas-pasan kemudian sekarang menjadi miskin.

3. Tidak Konsisten Terhadap Penentuan Penerimaan BLT

Ketidak konsistenan Pemerintah Pusat dalam penentuan penerima BLT yang sesuai dengan kriteria penerima BLT yang telah ditentukan. Oleh sebab itu kepala Desa Senyuir mencoba untuk melakukan pemerataan dalam penerimaan BLT, maka dari itu Pemerintah Desa melakukan revisi atau verifikasi data penerimaan BLT. Alasannya banyak kepala rumah tangga yang bersebelahan dengan kondisi yang hampir sama, yang satu dapat BLT dan yang satu lagi tidak. Hal inilah yang menyebabkan mereka terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat yang mendapatkan BLT dan yang tidak.

Dalam pencairan dana BLT juga masih belum konsisten dikarenakan sampai saat ini dana BLT belum direalisasikan sehingga

masyarakat banyak bertanya kepada pemerintah desa diakrenakan belum ada pemberitahuan dari pihak POS atau pemerintah pusat.

Sehingga dana yang disalurkan tidak berjalan dengan lancar, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yang selalu berubah-ubah yang menyebabkan penerimaan tidak tetap. sehingga banyak menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat hal ini dikarenakan kartu sebagai sarana pengambilan uang BLT sudah disebarluaskan, tetapi dana BLT belum direalisasikan sampai sekarang. Uang BLT hanya aktif dari tahun 2005 dan setiap tahun mengalami perubahan-perubahan aturan hingga tahun 2015 terakhir keluarnya dana BLT.

Berdasarkan wawancara dari beberapa warga, masyarakat bertanya-tanya tentang kapan pencairan dana BLT kembali tetapi menurut pengakuan masyarakat perintah Desapun tidak tahu menahu tentang kepastian BLT. Hal ini dikarenakan tidak ada pemberitahuan secara pasti dari pihak pemerintah pusat ke pihak Desa oleh karena itu Pemerintah Desa tidak bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang kepastian BLT masih ada atau tidak ada.

4. Sikap Pelaksanaan BLT

Jadi dari sikap pelaksanaan Dana Bantuan Langsung Tunai yang direalisasikan di Desa Senyur terjadi pemotongan dari setiap penerima masing-masing di potong Rp. 50.000. dan pemotongan ini sengaja dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan masyarakat yang tidak mendapatkan BLT. Dari hasil wawancara

dengan masyarakat di Desa Senyur ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan pemotongan tersebut.



Perpustakaan **UIN Mataram**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan urain pembahasan yang terbatas pada lingkup penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sasaran Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Senyur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada implementasi program BLT di Desa Senyur masih belum maksimal, dapat dilihat dari segi pendataan Rumah Tangga Sasaran yang masih banyak masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan BLT tetapi tidak mendapatkan dan menurut hasil wawancara dari masyarakat ketika pendataan dari BPS tidak semua rumah warga yang dikunjungi melainkan hanya beberapa rumah yang dikunjungi itulah yang menyebabkan terjadinya tidak tepat sasaran dalam penentuan RTS.

Sasaran implementasi program Bantuan Lansung Tuani yang dilakukan di Desa Senyur adalah Rumah Tangga Miskin yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik.

2. Faktor Penghambat Penyaluran Progeram BLT di Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

Ada beberapa faktor penghambat penyaluran dana BLT di Desa

Senyur seperti:

- a. Pendataan Penerima BLT
- b. Verifikasi Data
- c. Tidak Konsisten dalam Penentuan Penerimaan BLT
- d. Sikap Pelaksanaan BLT

B. Saran-saran

Dari semua bahasan disetiap bab di atas, dapat peneliti memberikan saran-saran seperti:

1. Diharapkan untuk Pemerintah Desa lebih jelas tentang penentuan sasaran penerima BLT seperti kriteria yang telah ditentukan dari BPS.
2. Diharapkan ketegasan Pemerintah Desa dalam melakukan verifikasi data penerima BLT.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Akhmaludin, 2015, "*Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Keluarga Harapan (PKH)*". IAIN Mataram: tidak diterbitkan.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006).
- Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011).
- Hulvan. *Efektifitas Program Pemerintah Melalui PNPM Mandiri dalam Usaha Penanggulangan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. IAIN Mataram, Mataram 2013.
- Lexi j. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010).
- Marini Dian. "Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak". Jom FISIP Volume 2 No. 1- Februari 2015,
- Meuthia Rosfadhila, Dkk. "Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia". Meuthia Rosfadhila et al. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2013
- Monita Dita. "Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dengan Menggunakan Metode Analytical Hierarcy Process". Pelita Informatika Budi Darma. Volume III Nomor : 2, April 2013
- Nazir Muhammad. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Nur Dhillah Haryanti. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Kecamatan Tanjungpinang Barat Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang Tahun 2012". diakses tanggal 01 juli 2017, 09.15.
- Par'aini. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa*. IAIN Mataram. Mataram 2013.
- Soerjono. *Pemberdayaan Sumber Daya*. (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 2000).
- Sugiyono. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: CV. Alfabeta. 2009).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: cv. Alfabeta. 2013).

Suharianto. "Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kantor Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Tentang Implementasi Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai)". *eJournal Administrasi Negara*, 2013, 1 (4): 1593-1607.

Suharto Edi. *Membangun Masyarakat Memberdaya Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2006).

Winengan. *Analisis Kebijakan Publik*. (IAIN Mataram: CV. Sanabil. 2015).

B. Sumber Internet

http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.landasan.teori.com/2015/10/pengertian-blt-bantuan-langsung-tunai.html?m%3D1&ei=_x4SzPYE&Ic=id-ID&s=1&m=746&host=www.google.co.id&ts=1491530542&sig=AJsQQ1BMn71toR66NHT15xvegj4KAQ. Jam 10:43 tanggal 07/04/2017.



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Perpustakaan **UIN Mataram**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jln. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 623819 Fax. 623819 Mataram NTB

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Darwan Pembimbing I : Dr. Winarjana, M.Si
NIM : 153 143 028 Pembimbing II : Azwardi, M. Hum

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1		Revisi judul	H
2		Revisi rumus awal ds tj > penulisan	H
3		Revisi lembar pengantar pd foto note	H
4		Revisi isi penulisan	H
5		Revisi daftar isi Revisi awal penulisan ds	H
6		Revisi daftar isi	
7		Revisi ds pd penulisan Revisi daftar isi ds	H
8		Revisi ds ds	
9		Revisi ds ds	H

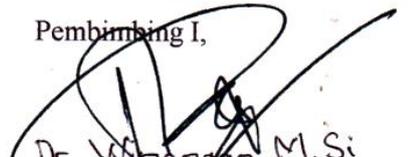
Judul Skripsi :

Mengetahui
Dekan,


Drs Subhan Abdullah, MA
NIP. 197107102001121002

Mataram, 17 - 4 - 2018

Pembimbing I,


Dr. Winarjana, M.Si
NIP. 197612312005-011007

Catatan :

* Nama, NIM, Pembimbing dan judul Skripsi yang diketik berdasarkan berita acara seminar (judul yang direkomendasikan pembimbing) diketik rapi dan diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk dicek/teliti dan ditanda tangani setelah diparaf oleh bagian akademik dan distempel.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jln. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 623819 Fax. 623819 Mataram NTB

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Darwan Pembimbing I : Dr. Wicenggan, M.Si
NIM : 153 143 028 Pembimbing II : Azwardi, M.Hum

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	9/2017 10	Revisi BAB I (Latar Belakang/konteks penelitian di kampus) dan observasi & wawancara di kelas	
2	31/2017 10	Canjutan ke BAB selanjutnya	
3	22/2018 1	Revisi BAB II Perbandingan Hadis y-1 terkait j-j jurnal Saipinings	
4			
5	2/2018 12	Revisi BAB III metode teori sebagai PISA analisis	
6	13/2018 12	Revisi Babus, lead out, sales, letih, hump leed/bene dll	
7	15/2018 12	Complan by ABSTRAK, photo, sent ket. peneliti, let. peng. dll.	
8		silaban ke pembay I.	
9		the big xajiba 4/2/18	

Judul Skripsi :

Mengetahui
Dekan

Dok Subhan Abdullah, MA
NIP. 197107102001121002

Mataram, 15. 02. 2018.

Pembimbing II

Azwardi, M.Hum
NIP. 19712312007101001

Catatan :
* Nama, NIM, Pembimbing dan judul Skripsi yang diketik berdasarkan berita acara seminar (judul yang direkomendasikan pembimbing) diketik rapi dan diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk dicek/teliti dan ditanda tangani setelah diparaf oleh bagian akademik dan distempel.

LAMPIRAN

Lampiran 1.



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jln. Flamboyan No. 2 Mataram Telp. 0370 - 622779 Fax. 0370 - 631581 Kode Pos 83126

SURAT IZIN

Nomor : 070 / 606 / 02 - BAPPEDA

**TENTANG
PENELITIAN**

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Surat Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi – UIN Mataram Nomor : 756/Un.12/FDIK/PP.00.9/11/2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : **DARWAN**
N I M : **153143028**
Alamat / HP : Lombok Timur / 0852 3797 5668
Untuk : Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :
**"ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PROGRAM BLT DI
DESA SENYIUR KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR".**
Lokasi : Desa Senyiur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur
Waktu : Selama 3 (tiga) Bulan sejak Izin Penelitian ini diterbitkan.

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI NTB** via email: litbang.bappedantb@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mataram
Pada tanggal, 17 November 2017

**an. KEPALA BAPPEDA PROV. NTB
KEPALA BIDANG LITBANG**



RETNO GWARTARI, S.Si., M.Kes
NIP. 19720210 199703 2 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- Gubernur NTB (sebagai laporan);
- Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi – UIN Mataram;
- Desa Senyiur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Dinas/Instansi Terkait;
- Yang Bersangkutan;
- Pertinggal;

Lampiran 2.

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
KECAMATAN KERUAK
KANTOR DESA SENYIUR
Jalan Jurusan Mendana-Tambun-Batu Golok Lombok Timur Kode Pos 83672
Email: desasenyiur@yahoo.com Website: -

SURAT KETERANGAN
Nomor :302/341/Ka.Pem/2018

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Desa Senyiur menerangkan dengan sebenar – benarnya kepada:

- Nama : **DARWAN**
- NIM : 153143028
- Tempat, Tgl Lahir : Dumai, 27 April 1996
- Jurusan/ Fakultas : Pengembangan Masyarakat Islam/IAIN Mataram
- Judul Skripsi : ***Analisis Faktor Penghambat Implementasi Program BLT di Desa Senyiur Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.***

Bahwa yang bersangkutan diatas memang benar telah melaksanakan/ melakukan Penelitian di Desa Senyiur Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, **sejak Tanggal 18 Nopember s/d 18 Pebruari 2018.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Senyiur, 21 Februari 2018
KEPALA DESA SENYIUR

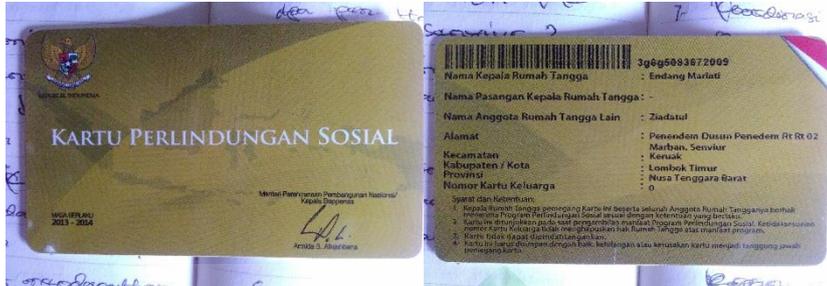
M U H A J I, S.Pt



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 3.

Kartu BLT



Kartu BLT 2013-2014 pemerintahan Sushilo Bambang Yudhoyono



Kartu BLT 2014-2019 pemerintahan Jokowi Widodo

Lampiran 4.



Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Senyuir tahun 2017



Peta monografi Desa Senyuir



Gambar bangunan Kantor Desa Senyuir

Lampiran 5.



Wawancara dengan masyarakat yang perekonomiannya menengah



Wawancara dengan Kepala Desa Senjiur



Wawancara dengan Pak RT



Wawancara dengan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah dan layak untuk mendapatkan BLT tetapi Inaq Zuka'iyah tidak mendapatkan BLT.



Wawancara dengan staf Desa sekaligus mantan Kadus



Wawancara dengan Inaq Mahani



Wawancara dengan H. Abdurrahman



Wawancara dengan Ibu Rauhun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram